



DAMPAK REFORMASI POLITIK DI UNI SOVIET TERHADAP NEGARA-NEGARA DI KAWASAN BALTIK

SKRIPSI

TIDAK DIPINJAMKAN KELUAR

Dijukan Guna memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S I)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh : No. Induk : PTI 2000 - 9786

S

Klass
947
Dwi
d

Rina Dwi Hastuti

NIM. EIA195022

Pembimbing

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA

NIP. 130 261 689

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2000

PENGESAHAN

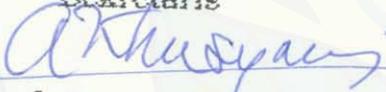
Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada :

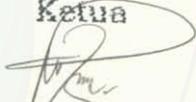
Hari : Rabu
Tanggal : 9 Pebruari 2000
Pukul : 08.00 WIB

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Sekretaris


Prof. Dr. A. Khusyairi, MA

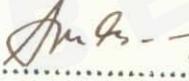
Ketua


Drs. Asrial Azis

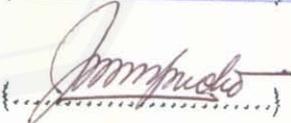
Anggota Penguji :

1. Drs. Asrial Azis
2. Prof. Dr. A. Khusyairi, MA
3. Drs. Sjoekron Sjah, SU
4. Drs. Sunerdi P, MIS


(.....)


(.....)


(.....)

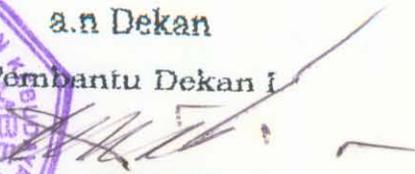

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

a.n Dekan

Pembantu Dekan I


Drs. Umaldi Radi, MA

NIP. 130 239 058



PERSEMBAHAN

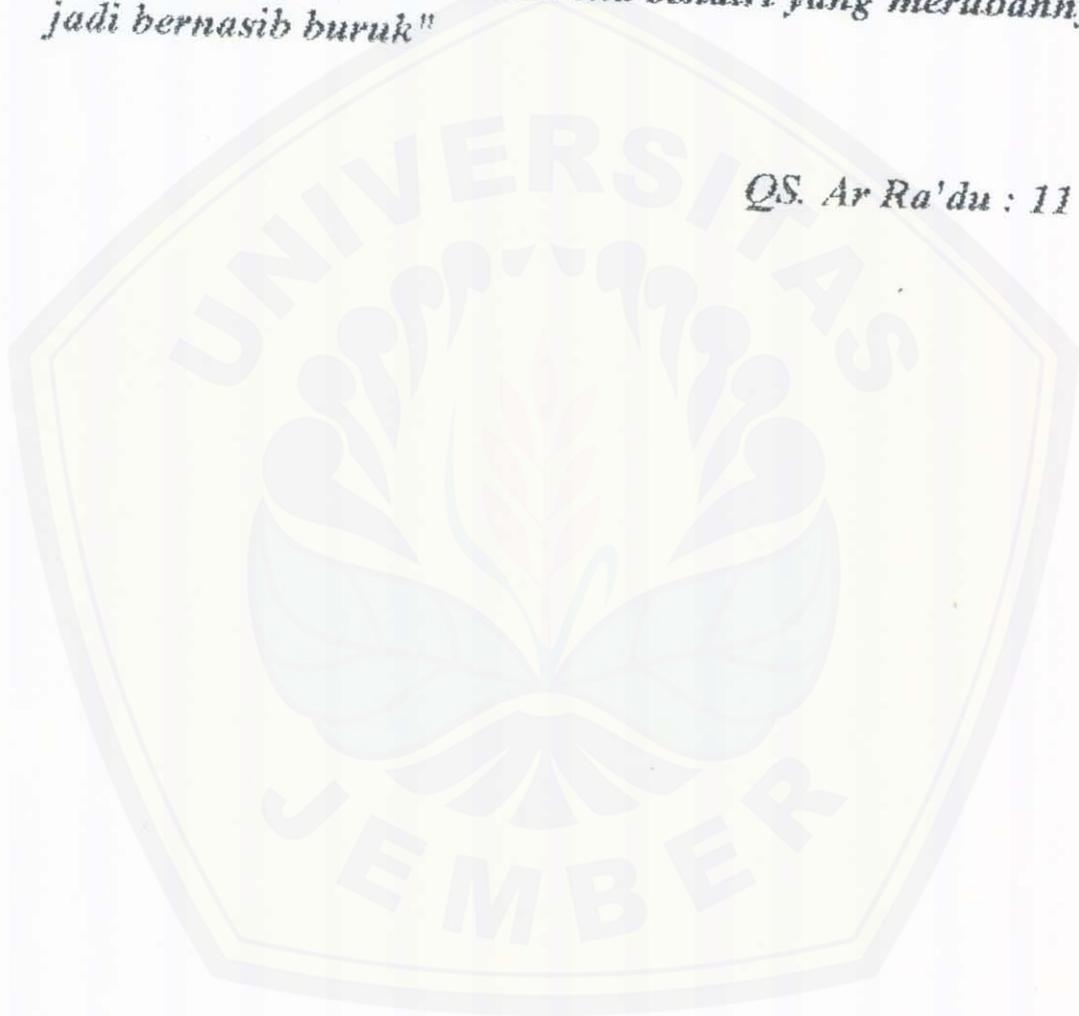
Karya tulis ini kupersembahkan untuk :

- *Kedua orang tuaku yang aku hormati, sayangi dan kagumi, Ayah-nda (almarhum) Roesbandi dan Ibunda Sutarti, sebagai tanda baktiku atas bimbingan, kasih sayang dan pengorbanan yang tak terbalas apapun.*
- *Kakak dan Adikku; Mas Heru, Mbak Mei, Dik Haris yang aku sayangi atas dorongan semangat yang memacuku dalam menyelesaikan tulisan ini.*
- *Yayanku, yang selalu mendampingiku dengan penuh kesabaran dan pengertian.*
- *Semua teman dan keluargaku yang telah memberikan dukungan moril dan spirituil.*
- *Nusa, bangsa dan Almamaterku*

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib baik sesuatu bangsa, kecuali mereka sendiri yang merubahnya jadi bernasib buruk"

QS. Ar Ra'du : 11



Sumber : Terjemah & Tafsir Al Qur'an
Bachtiar Surin, "Fa. SUMATRA," Bandung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin,

Puji syukur yang amat dalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan karya tulis ini.

Dalam penyusunan karya tulis yang berjudul "Dampak Reformasi Politik di Uni Soviet Terhadap Negara-Negara di Kawasan Baltik," ini sebenarnya merupakan pemaparan dari adanya hubungan antara reformasi yang membawa perubahan-perubahan dengan dampak yang ditimbulkan oleh reformasi itu sendiri. Setiap perubahan yang terjadi pasti akan membawa dampak baik itu positif maupun negatif. Demikian pula yang terjadi dengan dileksanakannya suatu reformasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih belum sempurna. Begitu banyak kekurangan dalam karya tulis ini karena keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya tulis ini yaitu :

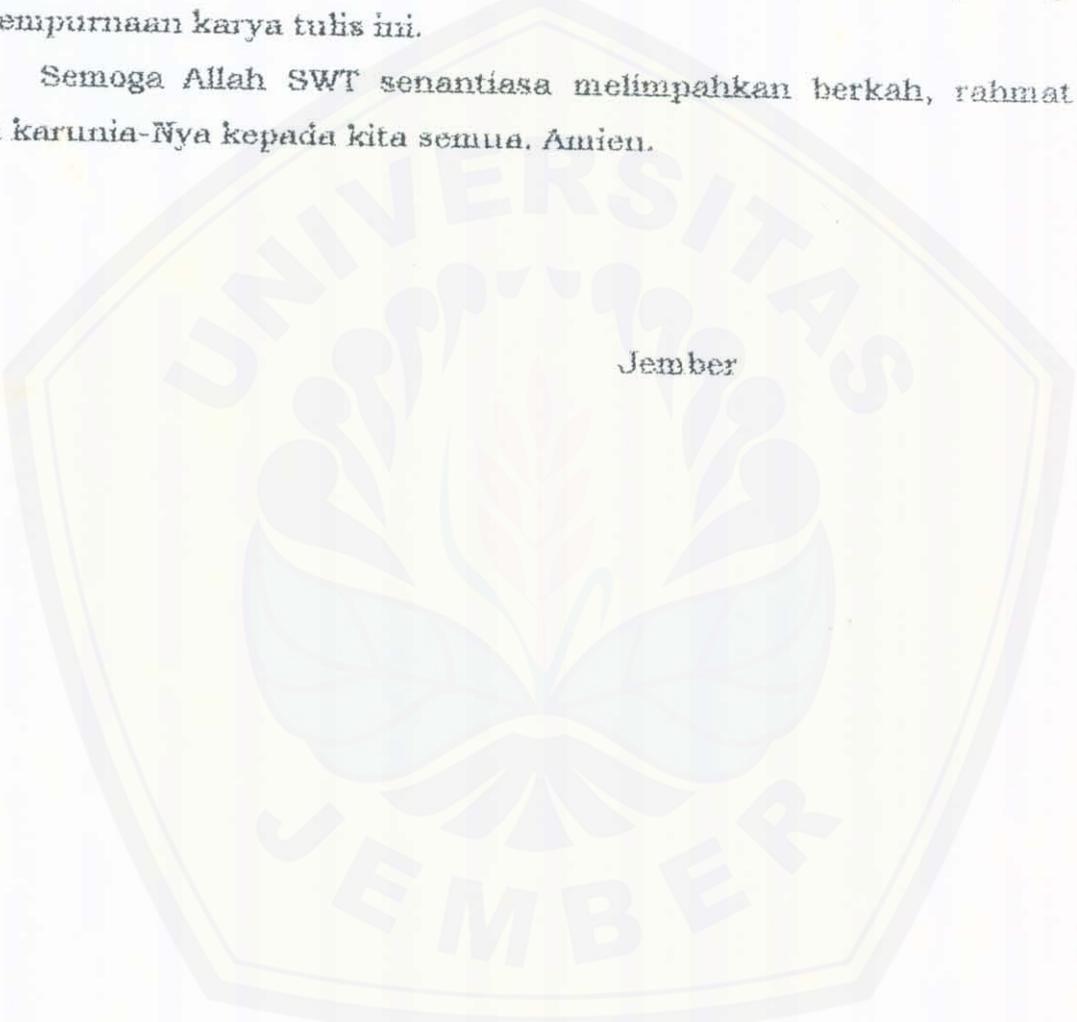
1. Bapak Prof. Dr. A. Khusyairi, MA, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sjoekron Sjah, SU, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah menyetujui penelitian ini.
3. Bapak Drs. Pra Adi S, selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa di FISIP Universitas Jember.
4. Bapak Prof. Drs. H. Bariman, selaku Dekan FISIP Universitas Jember.
5. Semua teman-teman seperjuangan, HI'95
6. Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu, Dila, Arien, Nana, dan arek-arek Imasemut, Aak, Mas Agung, Erwin, Keluarga

Besar Kelepa Dua, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thank a lot !

Selanjutnya penulis mohon maaf apabila dalam karya tulis ini terdapat kesalahan dan kealpaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan merupakan masukan yang berharga bagi kesempurnaan karya tulis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amien.

Jember



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Alasan Pemilihan Judul	1
1.2 Terminologi	3
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.4 Permasalahan	8
1.5 Kerangka Dasar Teori	9
1.6 Hipotesis	13
1.7 Metode dan Pendekatan	14
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	15
1.7.2 Metode Analisa Data	16
1.7.3 Metode Pendekatan	16
BAB II SITUASI DAN KONDISI TIGA REPUBLIK BALTIC SEBELUM REFORMASI	18
2.1 Sejarah Tergabungnya Tiga Republik Baltik Dengan Uni Soviet	18
2.2 Keadaan Sosial Politik Republik Baltik Sebelum Reformasi	21
2.2.1 Deskripsi Wilayah Baltik	21
2.2.2 Russifikasi Di Tiga Republik Baltik	24
2.2.3 Keadaan Politik di Tiga Republik Baltik Menjelang Pemisahan Diri Dari Uni Soviet	29
2.2.3.1 Lithuania	29
2.2.3.2 Latvia	32
2.2.3.3 Estonia	34
BAB III KEBIJAKAN GORBACHEV	37
3.1 Gorbachev Sebagai Tokoh Pencetus Reformasi	37
3.2 Kebijakan Reformasi Gorbachev	40
3.3 Wujud Reformasi Di Uni Soviet	43
3.3.1 Perestroika	44

3.3.2 Glasnost	45
3.3.3 Demokratizatsia	47
BAB IV DAMPAK KEBIJAKSANAAN GORBACHEV	50
4.1 Krisis Nasional Dan Reformasi di Uni Soviet	50
4.1.1 Latar Belakang Terjadinya Krisis Nasional ..	50
4.1.2 Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Krisis Nasional	59
4.1.3 Reformasi Di Uni Soviet	61
4.2 Perkembangan Reformasi Dan Dampaknya Terhadap Situasi dan Kondisi Di Uni Soviet	66
4.2.1 Perkembangan Reformasi	66
4.2.2 Dampak Reformasi Terhadap Situasi dan Kondisi Di Uni Soviet	70
4.2.2.1 Bangkitnya Gerakan Nasionalisme Di Republik-Republik Uni Soviet	70
4.3 Pemisahan Diri Tiga Republik di Kawasan Baltik	77
4.3.1 Proklamasi Kemerdekaan Tiga Republik Baltik	77
4.3.2 Faktor-Faktor Pendorong Pemisahan Tiga Republik Baltik Dari Uni Soviet	81
4.4 Kebijakan Gorbachev Dalam Mengatasi Masalah Pemisahan Diri Tiga Republik Baltik	85
BAB V KESIMPULAN	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Uni Soviet merupakan satu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dengan penduduknya yang multi etnis. Dengan berdasarkan ideologi komunis dan sistem pemerintahan terpusat, Uni Soviet menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya.

Seperti Swiss atau Amerika Serikat, Uni Soviet sebenarnya didirikan sebagai suatu unit dari negara yang berdaulat, yang bergabung bersama dalam suatu bentuk federasi atas dasar sukarela. Konstitusi Uni Soviet telah memuat serangkaian peraturan untuk mengarahkan saling keterkaitan hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara pemerintah pusat dengan republik-republik uni.¹ Secara formal masing-masing republik mempunyai konstitusi, rencana nasional dan anggaran sendiri-sendiri. Namun pada kenyataannya hal-hal tersebut tidak pernah diterapkan, ini disebabkan oleh karena pemerintah pusat juga berhak ikut campur bahkan membatalkan hukum-hukum republik tersebut bila hukum yang bersangkutan dinilai tidak sesuai dengan rencana dan konstitusi USSR. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah pusatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini sistem federasi yang ada di Uni Soviet tidak berjalan sebagaimana mestinya atau dapat pula dikatakan bahwa sistem di Uni Soviet merupakan

¹ Stephen Katz, *Soviet Federalism: A Comparative Perspective*, (Boulder : Westview Press, 1990), hal. 1

tersebut adalah berupa Glasnost (Keterbukaan), Perestroika (Restrukturisasi), dan Demokratizatsia (Demokratisasi).²

Namun reformasi yang ditumbuhkan oleh Gorbachev ini pada kenyataannya membawa petaka bagi negerinya sendiri. Kebebasan yang diberikan oleh Gorbachev telah berkembang menjadi kebebasan yang luar biasa dan Gorbachev tidak mampu mengendalikannya.

Kebebasan yang ditawarkan dalam reformasi Gorbachev disalah-artikan oleh masyarakat Uni Soviet yang kemudian menimbulkan persoalan yaitu adanya keinginan dari negara-negara federal yang berada di bawah Uni Soviet untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat Uni Soviet dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri yang sama sekali lepas dari kekuasaan pemerintah pusat.

Keinginan untuk memisahkan diri dari negara-negara federal yang ada di bawah Uni Soviet ini dimulai dengan adanya tuntutan dari negara-negara di Republik Baltik yaitu Lithuania, Latvia dan Estonia. Kemudian diikuti oleh kerusuhan etnis di Armenia, Azarbaijan, Kazakhistan dan Republik-republik yang ada di selatan yaitu Georgia, Ukraina dan Moldova.³ Selain itu pembentukan Negara Persemakmuran Merdeka oleh tiga negara terbesarnya yaitu Rusia, Ukraina dan Beyllorusia juga semakin memperjelas terjadinya disintegrasi di Uni Soviet.

Sebenarnya Andrei Amalrik, dalam bukunya yang berjudul "Will The Soviet Union Survive until 1984" sudah melihat benih-benih

² Alfian, *Perubahan Gorbachev, Maksud Ideologi dan Dampaknya di Uni Soviet dan Eropa Timur*, dalam Dwi Susanto dan Zainuddin Djafar (ed), *Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 55

³ F. Iriani Yudoyoko, *Disintegrasi Uni Soviet Dan Negara-Negara Baigianya*, dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pusat Antar Universitas bidang Ilmu-Ilmu Sosial UI (PAU-IS-UI), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 69

Keadaan di atas tentu saja akan menyebabkan tidak berjalannya sistem di Uni Soviet. Sebab, Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa suatu kesatuan disebut sistem apabila : (1)terdiri atas beberapa bagian yang (2)berbeda satu sama lain,tetapi (3)tidak begitu saja berdampingan melainkan disusun dalam satu hubungan jaringan satu sama lain.²

Adanya ketidaksabaran masyarakat dalam pelaksanaan reformasi inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya kekacauan-kekacauan dalam sistem yang berjalan di Uni Soviet. Hal-hal tersebut di atas akhirnya menimbulkan dampak yaitu terjadinya disintegrasi di Uni Soviet.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam mengkaji fenomena politik di Uni Soviet, penulis mengambil judul :

Dampak Reformasi Politik di Uni Soviet Terhadap Negara-Negara di Kawasan Baltik

1.2 Terminologi

Dalam suatu penulisan ilmiah diperlukan adanya suatu terminologi untuk menyamakan persepsi dan pengertian berbagai istilah pokok dalam tulisan tersebut. Sehingga akan terdapat kesatuan pandang terhadap beberapa istilah penting yang akhirnya akan dapat bertemu pada satu titik dan tidak rancu bila dicermati oleh orang lain.

Komarudin memberikan definisi pengertian terminologi sebagai berikut :

**Terminologi adalah ilmu logika yang mempelajari batasan-batasan atau definisi istilah-istilah. Kadang-kadang umum disebut peristilahan. Dalam ilmu sosial sering ditemukan suatu istilah*

² Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1988), hal. 155

berbeda, oleh karenanya dilakukan batasan-batasan untuk menjelaskannya." ⁶

Adapun kata atau istilah yang penulis anggap perlu diberi batasan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) **Reformasi Politik** atau pembaruan politik adalah merupakan proses perubahan politik dalam kerangka konstitusi tanpa mempersoalkan legitimasi kekuasaan negara yang ada.⁷
- b) **Kawasan Baltik**, merupakan suatu kawasan dari federasi Uni Soviet yang terdiri dari tiga negara yaitu Lithuania, Latvia dan Estonia, yang terletak di pantai sebelah timur Laut Baltik.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam pembuatan karya ilmiah perlu adanya suatu pembatasan yang inti dari pokok bahasan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan arti permasalahan yang dibahas dan menghindari pembahasan yang terlalu luas yang akan mengakibatkan berkurangnya bobot ilmiah suatu penulisan. Di samping itu ruang lingkup pembahasan juga akan mempermudah penganalisaan kejadian-kejadian pada kurun waktu tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mary G. dan Robert W. Kweit :

"...untuk menentukan ruang lingkup permasalahan yang tepat maka anda harus mempertimbangkan (1) alasan pelaksanaan penelitian, (2) waktu yang dimiliki untuk melaksanakan penelitian, (3) harapan-harapan mengenai panjang dalam produk jadi, (4) jumlah penelitian yang dilakukan sebelumnya di lapangan ini, (5) sumber-sumber yang ada seperti waktu, uang dan sebagainya, (6) keahlian." ⁸

⁶ Komarudin, *Kamus Istilah Skripsi dan Thesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hal.91-92

⁷ Roger Scruton, *Dictionary of Political Thought*, (London : Pan Books Ltd, 1983)

⁸ Mary G dan Robert W. Kweit, *Metode dan Konsep Analisis Politik*, Bina Aksara Jakarta, 1986, hal.23

Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis memberikan pembatasan-pembatasan yaitu :

1. Pembatasan Materi
2. Pembatasan Waktu

Pembatasan materi dalam tulisan ini lebih ditekankan pada apa yang dilakukan negara-negara di kawasan Baltik setelah dilaksanakannya pembaruan oleh Gorbachev di Uni Soviet serta langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Gorbachev dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan pembatasan waktu yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah mulai dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1991. Dilakukannya pembatasan waktu tersebut adalah karena pada tahun 1985 merupakan saat dimana untuk pertama kali diumumkannya program pembaruan oleh Gorbachev, yaitu ketika ia menduduki jabatan sebagai Sekjen PKUS setelah meninggainya Chernenko, dimana pada saat itu terjadi krisis kepemimpinan dalam tubuh PKUS. Dalam hal ini keberhasilan Gorbachev menduduki jabatan sebagai Sekjen PKUS tidak terlepas dari peranan dan dukungan Andrei Gromyko yang memberikan usulan agar Gorbachev yang ditunjuk untuk menggantikan Chernenko. Alasan penulis memilih batasan waktu tersebut disebabkan pada masa kekuasaan Gorbachev tersebut program pembaruan di Uni Soviet menjadi issue utama dan merupakan sorotan dalam masyarakat Uni Soviet, yang memang selama masa pemerintahan sebelum Gorbachev sangat mendambakan sosok yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Dan pada masa pemerintahan Gorbachev inilah keinginan masyarakat tersebut seolah mendapat angin segar dan membawa harapan baru. Sedangkan pada tahun

1991 merupakan saat dimana ketiga republik di kawasan Baltik resmi berpisah dari Uni Soviet dengan diproklamasikannya kemerdekaan ketiga republik tersebut.

Namun pembatasan ini tidaklah mutlak, karena penulis bisa juga memasukkan hal-hal di luar data tersebut yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4 Permasalahan

Di dalam kehidupannya, manusia akan selalu menjumpai permasalahan-permasalahan. Permasalahan adalah sesuatu yang harus dicari pemecahannya. Oleh karena itu sebelum dimulainya penelitian harus terlebih dahulu dirumuskan dan ditentukan permasalahannya, sehingga nantinya akan memudahkan dalam mengatasinya dan menemukan jawaban yang benar.

The Liang Gie memberikan pengertian masalah sebagai berikut :

"Masalah adalah suatu kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan hanya melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam. Masalah berhubungan dengan ilmu. Ilmu senantiasa mengajukan pertanyaan bagaimana (duduknya) dan apa sebabnya."⁹

Berdasarkan gambaran di atas, kita dapat mengamati permasalahan yang terjadi di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Gorbachev. Pada saat naiknya Gorbachev, ternyata ia tidak saja sudah siap menjadi Sekjen PKUS, tetapi ia juga sudah siap dengan konsep apa yang akan dilakukan oleh Uni Soviet.

Begitu muncul sebagai orang pertama dalam tubuh PKUS, Gorbachev meluncurkan gagasan yang dituangkan dalam bukunya *Perestroika*. Dalam buku tersebut tidak saja merupakan kritik bagi

⁹ The Liang Gie, Ilmu Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.49

Adapun pengertian teori menurut Mc.Cain dan Erwin Segal adalah sebagai berikut :

"Serangkaian statement yang saling berkaitan...[yang terdiri atas] : (1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu, (2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain; dan (3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statement teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesis).¹⁰

Sedangkan menurut James E. Dougherty dan Robert L. Pfalgriff Jr, pengertian teori adalah :

"Teori adalah cara mengorganisasi pengetahuan kita sedemikian rupa sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan yang pantas dicarikan jawaban yang valid"¹¹

Untuk itu teori merupakan hal yang sangat penting, karena sekumpulan data tidak akan mempunyai arti apabila belum tersusun secara sistematis dalam suatu sistem pemikiran.

Kerangka dasar teori pada dasarnya untuk menentukan tujuan dan arah penelitian atau penulisan konsep yang tepat dalam pembentukan hipotesis. Berangkat dari pengertian di atas, penulis mengkaji masalah ini menggunakan **Teori Perubahan Politik (Political Change)**.

Perubahan Politik atau Political Change merupakan transformasi struktur, proses atau tujuan-tujuan yang mempengaruhi distribusi dan penggunaan kekuasaan yang memerintah dalam suatu masyarakat. Perubahan politik ini bisa terjadi karena penyesuaian sistem terhadap tuntutan-tuntutan baru

¹⁰ Garvin Mc.Cain dan Erwin Segal, *The Game of Science*, (Brooks Cole 1973), hal.99, dalam Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LPSES, 1990), hal. 219

¹¹ James E. Dougherty dan Robert L. Pfalgriff, dalam M. Amien Rais, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, UGM, Yogyakarta, 1986, hal. 124

dan perubahan lingkungan, atau karena satu sistem tidak lagi mampu mempertahankan diri, sehingga diganti dengan sistem lain.¹²

Secara umum teori perubahan politik dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Perubahan komponensial
2. Perubahan krisis
3. Perubahan kompleks

Sedangkan menurut Huntington, perubahan politik mencakup suatu analisa pada tiga tingkat yaitu :

1. Suatu perbandingan antara tingkat kecepatan, jangkauan dan arah perubahan dalam suatu komponen ke arah kecepatan, jangkauan dan arah perubahan komponen lainnya.
2. Perbandingan perubahan dalam kekuatan dan isi satu unsur dalam suatu komponen dan perubahan dalam kekuatan dan isi unsur-unsur lainnya dalam komponen yang sama.
3. Suatu studi khusus mengenai perubahan dalam kekuatan, maksud, kepentingan dan nilai dalam satu unsur.¹³

Berangkat dari teori tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dampak dari reformasi politik Gorbachev yang menimbulkan adanya keinginan negara-negara Baltik untuk memisahkan diri dari Uni Soviet adalah dipengaruhi oleh adanya Perubahan Politik yang terjadi di Uni Soviet. Perubahan Politik ini terjadi karena adanya suatu gagasan yang menawarkan satu bentuk tatanan baru dimana dalam tatanan tersebut masyarakat akan mendapatkan kebebasan untuk berekspresi dan mengungkapkan apa yang menjadi keinginan dan harapan mereka. Kebebasan inilah kemudian yang mendorong

¹² Jack C. Plano (et.al), *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 162-163

¹³ Samuel P. Huntington, "The Change to Change," *Modernization, Development and Politics*, dalam S.P. Varma, *Modern Political Theory*, Tohir Effendi (ed) Rajawali Press, Jakarta, 1987, 450

masyarakat untuk mengemukakan keinginan bahkan menuntut haknya, dimana memang selama ini mereka tidak diberi kesempatan untuk berpendapat mengekspresikan apa yang menjadi keinginan mereka.

Adanya tuntutan-tuntutan dari masyarakat inilah yang kemudian mendorong terjadinya perubahan-perubahan terutama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Dapat kita lihat di sini bahwa yang terjadi adalah perubahan dalam bentuk organisasi dan aturan-aturannya, dimana negara-negara di Republik Baltik menuntut untuk melepaskan diri dari kekuasaan pemerintah pusat dan berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan memiliki hak otonomi sendiri.

Tuntutan-tuntutan yang muncul di kalangan masyarakat Uni Soviet selain didorong oleh adanya keterbukaan dan kebebasan dalam reformasi, juga disebabkan oleh semakin lemahnya kontrol dari pemerintah pusat terhadap republik-republik yang ada di Uni Soviet. Melemahnya kontrol dari pemerintah pusat ini terjadi karena tidak adanya lagi monopoli kekuasaan oleh Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dimana selama ini PKUS-lah yang menjadi sumber kekuatan utama bagi pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat, dalam hal ini Gorbachev, dalam menentukan kebijaksanaan tidak lagi memusatkan perhatian pada dominasi kekuasaan dalam masyarakat tetapi lebih menekankan pada usaha untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Uni Soviet. Usaha tersebut terutama ditujukan pada pembangunan ekonomi dimana selama ini Uni Soviet memang sangat tertinggal dibanding negara-negara besar di dunia, sehingga kontrol terhadap republik-republik di

"Hipotesis adalah sebagai suatu persyaratan tentang hubungan yang diharapkan akan terjadi antara variabel yang dapat diuji secara empiris guna menentukan keterkaitannya."¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dalam menjawab permasalahan yang penulis angkat, penulis mencoba mengajukan hipotesis sebagai berikut :

Dampak yang ditimbulkan oleh adanya reformasi politik di Uni Soviet adalah terjadinya disintegrasi di Uni Soviet dalam hal ini adalah di kawasan Baltik dimana dalam upaya mengatasi dampak tersebut ditempuh langkah-langkah antara lain :

- a. Perundingan damai antara pemerintah pusat dengan pemimpin-pemimpin Republik-Republik Baltik.
- b. Diadakannya referendum mengenai pemisahan diri tiga Republik Baltik.
- c. Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur pemisahan tiga Republik di kawasan Baltik.

1.7 Metode dan Pendekatan

Untuk memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah haruslah mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu dalam penulisan ini digunakan metode agar arah pembahasan masalah dapat dimengerti secara jelas dan sistematis. Berkaitan dengan hal tersebut Prof. Dr. Winarno Surachmad, M.Sc memberi pengertian metode sebagai berikut :

"Metode adalah merupakan cara utama yang digunakan untuk mencari suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaian hipotesis dengan menggunakan teknik dan alat tertentu. Cara utama ini digunakan

¹⁴ Jack C. Plano, et.al, Kamus Analisa Politik, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 53.

setelah penyelidikan memperhitungkan kewajaran dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan.”¹⁵

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

- a. Metode Pengumpulan Data
- b. Metode Analisa Data
- c. Metode Pendekatan

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk tulisan ini, maka penulis melakukan penelitian perpustakaan (*library research*). Sumber data berasal dari buku-buku, artikel, surat kabar, buletin, terbitan berkala, majalah dan sumber data lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam mengumpulkan data untuk tulisan ini penulis akan mengunjungi beberapa lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Adapun lembaga-lembaga yang akan penulis kunjungi adalah sebagai berikut :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
3. Puslitbang Departemen Luar Negeri di Jakarta
4. Perpustakaan Centre Strategic for International Studies (CSIS) di Jakarta
5. Internet

Hal tersebut penulis lakukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan baik dari segi waktu, dana, dan tempat yang tidak memungkinkan karena letak geografis dan sifat kerahasiaan negara

¹⁵ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Keseach*, 1978, CV. Tarsito, Bandung

yang bersangkutan untuk melakukan penelitian langsung terhadap obyek pengamatan.

1.7.2 Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data yang berarti menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikan data. Dalam menimbang dan menyaring data adalah dengan benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan adalah menggolongkan dan menyusun menurut aturan tertentu. Gejala yang sama dikelompokkan menjadi satu kemudian dibuat klasifikasi dan kategori-kategori tertentu.

Penulis dalam hal ini menganalisa data dengan cara berpikir deduktif. Mengenai metode deduksi, Mochtar Mas'ood menjelaskan :

"Dari prinsip umum menghasilkan prinsip-prinsip yang lebih rendah, sesudah itu kita bisa menguji masing-masing proposisi itu dengan menelaah peristiwa-peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus-kasus khusus itu bisa dijelaskan atau bahkan diramalkan oleh teori kita itu"

Metode ini mengantar suatu analisa sebuah hasil pengamatan penulis terhadap dampak yang ditimbulkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi dengan dilaksanakannya suatu reformasi.

1.7.3 Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan satu tulisan yang mempunyai tingkat kebenaran tinggi maka diperlukan suatu pendekatan ilmiah. Menurut The Liang Gie pendekatan adalah :

"Keseluruhan sikap penyelidik, sudut pandang, ukuran, pangkal duga dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mendekati suatu

Sasaran dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai
sasaran yang ditelaah lima itu." ¹⁶

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu **Pendekatan Sejarah** dan **Pendekatan Sosiologi Politik**. Pendekatan sejarah dimaksudkan untuk mengetahui proses peristiwa atau gagasan yang timbul di masa lampau yang melatarbelakangi suatu peristiwa yang terjadi saat ini. Dalam hal ini pendekatan sejarah diperlukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pemisahan ketiga negara Baltik setelah diadakannya reformasi politik oleh Gorbachev di Uni Soviet.

Pendekatan sosiologi politik yaitu pendekatan yang menggabungkan sosiologi dengan penekanan pada kondisi yang ada pada masyarakat dengan ilmu politik dengan penekanan pada aspek kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini penulis menekankan pada adanya kaitan erat antara pemisahan ketiga negara di Republik Baltik dengan pemerintah pusat dalam hal ini kekuasaan yang ada di Uni Soviet. Karena berbicara tentang kekuasaan di Uni Soviet tentu saja akan berkaitan pula dengan negara-negara federasi yang ada di bawah kekuasaan Uni Soviet termasuk di dalamnya Republik Baltik. Berkaitan dengan hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan antara reformasi politik di Uni Soviet dengan adanya keinginan dari negara-negara di Republik Baltik untuk memisahkan diri dari kekuasaan Uni Soviet. Jadi dalam hal ini terdapat kaitan antara pemisahan diri negara-negara Republik Baltik dengan kekuasaan yang ada di Uni Soviet.

¹⁶ The Liang Gie, op.cit, hal.75

BAB II
SITUASI DAN KONDISI
TIGA REPUBLIK BALTIC SEBELUM REFORMASI

2.1 Sejarah Tergabungnya Tiga Republik Baltik dengan Uni Soviet

Sejak awal mula perjalanan sejarah tiga Republik Baltik, Lithuania, Latvia dan Estonia berganti-ganti penguasa yang mendudukinya. Estonia dan Latvia sejak abad XII sampai abad XIV dikendalikan oleh Jerman dan kemudian dilanjutkan oleh Swedia pada tahun 1561 sampai 1721. Setelah periode tersebut kekuasaan diambil alih oleh Tsar Rusia sampai pada tahun 1918. Sementara Lithuania sejak 1386 sudah berada di bawah konfederasi Polandia dan baru pada bulan Desember 1917 Lithuania memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian diikuti oleh Latvia dan Estonia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada bulan Februari 1918.

Pada saat ketiga negara tersebut memproklamasikan kemerdekaannya, Jerman mulai membayangkan dan berusaha menggagalkan dengan berbagai ancaman dan tekanan. Namun usaha Jerman tersebut mengalami kegagalan setelah tentara merah Uni Soviet membantu ketiga negara tersebut.

Dengan kemenangan tentara merah inilah kemudian Uni Soviet menyatakan bahwa sejak saat itu Lithuania, Latvia dan Estonia menjadi bagian dari Uni Soviet. Namun pernyataan itu kembali ditentang oleh Jerman melalui serangan-serangan dan tekanan yang dibantu oleh tentara dan sukarelawan setempat.

Usaha Jerman tersebut akhirnya memperoleh hasil yaitu dengan dikosongkannya Latvia dan Estonia pada 1919.¹

Pada tahun 1926, Uni Soviet mengadakan perjanjian rahasia dengan Jerman yaitu "*Agreement of Non Agression and Neutrality.*" Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa Uni Soviet mendapatkan wilayah Finlandia, Estonia, Latvia dan Bessarabia. Dan Jerman mendapatkan wilayah Polandia Timur termasuk Lithuania.²

Namun ternyata Uni Soviet belum bisa menerima perjanjian tersebut. Uni Soviet masih beranggapan Jerman mencari keuntungan sehingga sengketa antara Uni Soviet dan Jerman terus berlanjut. Keadaan ini mulai berubah setelah kedua negara tersebut mengadakan perjanjian perdamaian. Sekali lagi Uni Soviet dan Jerman mengadakan perjanjian netralitas yang kemudian dikenal sebagai "Molotov-Ribentrop Pact" pada 23 Agustus 1939. Salah satu bunyi dari perjanjian tersebut adalah :

"On the occasion of the signature of the non aggression treaty, respective sphere of interest is one even territorial and political transformation in territories belonging to the Baltic States the northern frontier of Lithuania shall represent the frontier of the sphere both of Germany and the USSR. 3

Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa antara Jerman dan Uni Soviet akan menjadikan Lithuania sebagai bagian dari kepentingannya. Namun Uni Soviet berubah

¹ Donald W. Treathgold, *Twentieth Century Russia*, (Boston : Houghton Mifflin Company), hal.159

² Donald W. Treathgold, *ibid*, hal.317

³ Documents on the USSR's Relation with The Baltic Countries in 1939 - 1940, *The Baltic Join The Soviet Union*, *International Affairs*, hal.135

mengingkari perjanjian dengan mengadakan serangan terhadap Polandia Timur pada 17 September 1939. Dari perbatasan antara Jerman dan Uni Soviet menjadi kacau. Dan semenjak itulah Uni Soviet mengklaim wilayah Lithuania, Latvia dan Estonia menjadi bagian dari wilayahnya.⁴

Namun negara-negara barat tidak mau mengakui penggabungan tersebut, terutama pihak Jerman yang sama sekali tidak mau mengakuinya bahkan hal ini menjadikan hubungan antara Jerman dan Uni Soviet terganggu hingga sebelum adanya reformasi di Uni Soviet. Dalam hal ini Uni Soviet menyatakan penggabungan ini dilakukan dengan sukarela dan melalui pemungutan suara. Akan tetapi pernyataan Uni Soviet tersebut dibantah oleh negara-negara di Republik Baltik dengan menyatakan pemungutan suara dilakukan di bawah ancaman tentara Uni Soviet.

Setelah Uni Soviet mendapatkan Lithuania pada bulan September dan pada bulan Oktober Uni Soviet memaksa tiga negara di Republik Baltik untuk menandatangani "Mutual Assistency Pact." Dan pada tahun 1940, secara resmi Uni Soviet menyatakan bahwa Lithuania, Latvia dan Estonia merupakan bagian dari Uni Soviet dengan nama Republik Baltik Uni Soviet.⁵

Akan tetapi pernyataan Uni Soviet ini banyak dikecam oleh negara-negara di dunia internasional diantaranya Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat yang menilai tindakan Uni Soviet ini sebagai tindakan yang ilegal. Oleh karena itulah banyak negara-negara yang membiarkan konsulat dari tiga

⁴ Donald W. Treathgold, *op.cit*, hal.317

⁵ Donald W. Treathgold, *op.cit*, hal.159

negara Baltik menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tidak mengakui eksistensi Uni Soviet di Lithuania, Latvia dan Estonia. Seperti Amerika Serikat yang juga mempertahankan pengakuannya terhadap tiga negara Baltik dengan cara melanjutkan kehadiran kedutaan besarnya di Uni Soviet.⁶

2.2 Keadaan Sosial Politik Republik Baltik Sebelum Reformasi

2.2.1 Deskripsi Wilayah Baltik

Di sini penulis akan memberikan gambaran umum mengenai tiga negara di Republik Baltik.

A. Lithuania

Lithuania merupakan Republik Baltik yang terletak di sebelah timur laut Eropa, di sebelah utara berbatasan dengan Latvia, sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Belorussia, di sebelah tenggara berbatasan dengan Polandia dan Kaliningrad Oblast, Rusia dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Baltik. Lithuania memiliki luas wilayah kurang lebih 65.200 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 3.740.000 pada tahun 1994.⁷

Meskipun bidang pertanian mendominasi perekonomian Lithuania sebelum aneksasi Soviet tahun 1940, namun industri merupakan sektor utama dari ekonomi. Pengolahan makanan dan mesin listrik merupakan industri yang sangat penting. Industri lainnya antara lain semen, tekstil, televisi, dan kertas. Produk nasional bruto (GNP) Lithuania pada tahun 1991 adalah

⁶ Jussac Kartjana, *Lithuania Dalam Politik Luar Negeri AS-US*, (Jurnal Politik Internasional : Global 3), tahun 1992, hal.16

⁷ "Lithuania," Microsoft (R) Encarta (R) 96, Ensiklopedia (C), 1993 - 1995

sebesar 10.220 juta dolar atau sekitar 2.710 dolar per kapita (World Bank estimates; 1989-1991 prices).

Pada bidang pertanian Lithuania menghasilkan antara lain kentang, gula beet dan gandum yang hanya dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya saja dan bahkan tidak jarang masih menggantungkan pada impor dari negara lain.

Sumber-sumber mineral yang dimiliki oleh Lithuania sangat terbatas. Produksi energi Lithuania dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan seluruh negeri. Namun demikian perekonomian Lithuania masih tergantung pada Rusia yaitu pada penawaran minyak bumi di pasaran dunia.⁸

B. Latvia

Latvia merupakan Republik yang terletak di timur laut Eropa, di sebelah utara berbatasan dengan Estonia dan Teluk Riga, di Laut Baltik, sebelah timur berbatasan dengan Rusia, di sebelah selatan berbatasan dengan Belorussia dan Lithuania, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Baltik. Wilayah Latvia memiliki luas kurang lebih 63.700 km². Jumlah penduduk pada tahun 1993 adalah 2.606.200 jiwa. Latvia beribu kota Riga yang merupakan kota terbesar.⁹

Industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Latvia dan merupakan produsen lebih dari 50% dari keseluruhan bahan material. Pada tahun 1991, produk nasional bruto dari Latvia sebesar 9.193 juta dolar atau sama dengan 3.410 dolar per kapita (World Bank Estimate, 1989-1991 prices).

⁸ "Lithuania", Microsoft(R) Encarta(R) 96, Ensiklopedia(C) 1993 - 1995

⁹ "Latvia," ibid

Latvia merupakan produsen penting dari kereta bertenaga listrik untuk pengangkut penumpang dan juga merupakan produsen barang-barang konsumen seperti radio dan kulkas. Produk lain seperti baja, semen, produk makanan, dan tekstil (khususnya wool) juga dihasilkan oleh Latvia.

Di bidang pertanian Latvia menghasilkan kentang, gula beet; sedangkan di bidang kehutanan Latvia menghasilkan karet. sumber mineral yang ada di Latvia antara lain adalah peat, pasir dan beberapa bahan tambang lainnya.

C. Estonia

Estonia atau nama resminya Estonia Soviet Socialist Republik merupakan Republik yang terletak di sebelah timur laut Eropa, di sebelah utara berbatasan dengan teluk Finlandia, sebelah timur berbatasan dengan Rusia, di sebelah selatan berbatasan dengan Latvia, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Baltik. Estonia mempunyai kurang lebih 1500 pulau, yang terbesar adalah Saaremaa dan Hiiumaa, memisahkan Teluk Riga dari Baltik. Luas wilayah Estonia sekitar 45100 km². Ibu kota Estonia adalah Tallin yang merupakan kota terbesar dan sekaligus sebagai pusat pemerintahannya.¹⁰

Pada 1991, Produk Nasional Bruto dari Estonia sebesar 6.088 juta dolar atau sama dengan 3830 dolar per kapita (World Bank Estimate, 1989-1991 prices). Industri merupakan sektor utama dalam perekonomian Estonia. Dalam hal ini merupakan setengah dari total produk nasional bruto dan urutan ketiga dari jumlah total tenaga kerja. Mesin dan pengolahan logam merupakan sektor unggulan dalam industri. Estonia juga sebagai

¹⁰ "Estonia," Microsoft (R), Encarta (R), Ensiklopedia (R), 1993 - 1995

produsen gas dan kimia. Industri lainnya adalah semen, tekstil (katun, linen dan wool), komponen mobil dan barang-barang kulit. Di bidang kehutanan Estonia menghasilkan kayu, karet, kayu lapis, dan barang-barang furnitur.

Estonia merupakan republik pertama yang mengeluarkan mata uangnya sendiri, yaitu *kroon* yang mulai diedarkan pada 1992. Di sini menunjukkan bahwa Estonia merupakan satu-satunya negara Baltik yang sudah siap dengan alat pembayaran moneternya.

2.2.2 Russifikasi Di Tiga Negara Baltik

Semenjak Uni Soviet menguasai tiga negara di kawasan Baltik, Lithuania, Latvia dan Estonia, sejak saat itu pula Uni Soviet mulai menjalankan program Russifikasi di wilayah tersebut.

Russifikasi ini tidak hanya terbatas pada bidang politik akan tetapi juga pada berbagai segi kehidupan masyarakat di ketiga negara tersebut. Russifikasi mempunyai arti harfiah sebagai penyatuan berbagai kebudayaan ke dalam budaya Rusia (=Rusianisasi) baik bahasa, kesenian, pendidikan dan kebudayaan pada umumnya.

Alasan Stalin melaksanakan program Russifikasi adalah pertama; alasan politis yaitu untuk mencapai percepatan integrasi dan stabilitas. Dalam pandangan Stalin, kebangsaan (nation) atau kelompok bangsa adalah :¹¹

Hasil pembentukan sejarah terhadap komunitas rakyat yang secara sejaj (stable) dibentuk melalui kebersamaan bahasa, teritorial, kehidupan ekonomi

¹¹ F. Iriani Sophiana Yudoyoko, Disintegrasi Uni Soviet Dan Negara-Negara Bagiaranya, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 73

pelesan psikologi (psychology make up) yang kemudian terwujud menjadi satu bentuk kesatuan budaya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa konsep Stalin mengubah Uni Soviet dari Supra Nasional menjadi suatu negara bangsa, lebih menekankan pada *Slianie* (mendekati pengertian asimilasi) daripada *Sblizhenie*, yaitu melebur berbagi kesuku-bangsaan ke dalam kesatuan budaya dan bahasa suku dominan dengan tujuan membentuk pola pikir dan kepentingan nasional yang sama.¹² Jelas bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan konstitusi Uni Soviet yang memuat tentang hubungan antara pusat dan daerah dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pertimbangan tersebut juga terlihat lebih pragmatis untuk kepentingan pemerintah pusat dalam mempertahankan kekuasaannya.

Pada saat memulai program Russifikasi, Stalin beranggapan bahwa Russifikasi sudah berlangsung pada masa Tsar, oleh karena itu ia menyimpulkan bahwa rakyat paling tidak telah melampaui proses adaptasi dengan kebudayaan Rusia. Karenanya ia juga beranggapan bahwa program Russifikasi yang dilaksanakannya hanyalah meneruskan dan memperkuat saja.

Di bawah pemerintahan Stalin, Russifikasi dilaksanakan dengan paksaan dan ancaman senjata dan dalam berbagai bentuk. Yang paling menonjol adalah mengontrol secara politis semua unsur pendidikan, media massa dan informasi. Ini berarti bahwa semua penerbitan dan buku-buku harus dalam bahasa Rusia. Menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa nasional, yang harus digunakan dalam forum-forum resmi, seperti di sekolah-sekolah dari TK sampai dengan SLTA, sedangkan di Universitas

¹² F. Iriani Sophian Yudoyoko, *ibid*, hal. 73

bahasa Rusia adalah bahasa wajib; bahasa Rusia juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan promosi jabatan ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam berbahasa Rusia. Selain itu bahasa Rusia juga wajib digunakan dalam media massa, komunikasi dan informasi.

Cara lain yang diterapkan oleh Stalin dalam melaksanakan program Russifikasi ini adalah dengan mengadakan perpindahan penduduk dari wilayah Baltik ke wilayah lain dan sebaliknya mendatangkan warga berkebangsaan Rusia ke wilayah Baltik.

Berbagai cara yang ditempuh Stalin di atas mungkin lazim dilakukan oleh satu negara untuk menciptakan integrasi nasionalnya. Namun tentu saja usaha tersebut harus dilaksanakan dengan cara damai tanpa paksaan atau ancaman dan diusahakan agar jangan sampai muncul kecemburuan sosial karena adanya perlakuan yang tidak adil dan mengistimewakan salah satu etnis. Akan tetapi yang terjadi di Uni Soviet pada kenyataannya adalah peleburan unsur-unsur non-Rusia dan sekaligus pemberian keistimewaan bagi etnis Rusia. Hal ini tentu saja membawa pengaruh yang cukup besar dan serius bagi warga yang berkebangsaan non-Rusia.

Pengaruh Russifikasi ini juga dapat dilihat dalam bidang politik dimana tidak sedikit orang-orang Rusia yang menduduki posisi kunci pada pemerintahan di ketiga republik Baltik terutama di Latvia dan Estonia. Kesenjangan ini sering menimbulkan sentimen politik antara bangsa asli setempat dengan bangsa pendatang (Rusia). Dalam pemerintahan dalam negeri ketiga negara Baltik juga mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi terutama karena banyaknya warga berkebangsaan

Latvia dan Estonia yang mati dalam peperangan maupun yang sengaja dibunuh oleh tentara merah juga termasuk yang dipindahkan ke wilayah lain.

Pengaruh Russifikasi dalam bidang sosial budaya dapat dilihat pada usaha Uni Soviet untuk menenggelamkan budaya bangsa Lithuania, Latvia dan Estonia dan menggantinya dengan budaya Rusia. Hal ini terbukti dengan adanya larangan penggunaan bahasa asli setempat dalam kehidupan sehari-hari, dalam forum resmi, di sekolah-sekolah dan dalam media massa. Sebagai gantinya harus digunakan bahasa Rusia. Bukan hanya itu penelitian-penelitian untuk pengembangan kebudayaan bangsa Baltik juga dilarang, dan apabila larangan itu dilanggar maka akan berhadapan dengan KGB.

Selain pada bidang kebudayaan, dalam bidang perekonomian Russifikasi juga berlaku. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan ketergantungan dari negara-negara Republik Baltik terhadap Uni Soviet. Namun ternyata bukan hanya ketergantungan yang terjadi tetapi lebih jauh yaitu adanya ekspansi dalam bidang perekonomian oleh orang-orang Rusia terutama dalam bidang-bidang yang dianggap menguntungkan, untuk itulah rakyat Baltik memberikan julukan "Ruble Imigrant."

Akan tetapi program Russifikasi yang direncanakan ternyata tidak membawa hasil seperti yang diharapkan Uni Soviet. Malah sebaliknya menyebabkan munculnya konflik-konflik etnis di kawasan Baltik baik itu dalam bidang politik maupun sosial budaya. Konflik ini pernah meledak pada tahun 1972 di Tallin (ibukota Estonia) yaitu dengan diadakannya

demonstrasi besar-besaran yang mengancam Russifikasi dan pada tahun 1982 terjadi hal yang sama di Kaunas, salah satu kota di Lithuania.

Selain adanya konflik-konflik di atas, upaya untuk menentang Russifikasi juga dilakukan untuk menuntut dilakukannya peralihan wewenang yang lebih besar mengenai perekonomian di negara-negara Republik Baltik. Mereka juga menuntut adanya suatu wilayah atau daerah-daerah tertentu yang memberi kesempatan bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Namun dalam pelaksanaan kehidupan perekonomian dalam negeri masih terdapat kesenjangan terutama dalam proses produksi dimana buruh-buruh yang dipekerjakan sebagian besar adalah bangsa Rusia yang dianggap lebih terampil daripada bangsa Baltik.

Sebenarnya Gorbachev menyetujui tuntutan yang diajukan republik-republik Baltik tentang peralihan wewenang perekonomian. Namun bangsa Baltik masih ragu-ragu terhadap sikap Gorbachev, karena seringkali dalam reformasi ekonomi yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Keadaan ini mulai menunjukkan perubahan semenjak digulirkannya reformasi oleh Gorbachev yang menawarkan adanya keterbukaan dan kebebasan bagi rakyat Uni Soviet. Dan ternyata keterbukaan dan kebebasan yang diberikan menyebabkan timbulnya tuntutan bangsa Baltik untuk memisahkan diri.

2.2.3 Keadaan Politik di Tiga Negara Baltik Menjelang Pemisahan Diri dari Uni Soviet

2.2.3.1 Lithuania

Lithuania merupakan salah satu negara yang berada di Republik Baltik yang sangat gigih memperjuangkan keinginannya untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat Uni Soviet. Pada akhir tahun 1980-an terjadi perubahan yang cepat dalam kehidupan politik di Eropa Timur dan di Uni Soviet yang ditandai dengan timbulnya nasionalisme di Lithuania.¹³

Kebangkitan nasionalisme di Lithuania ini ditandai dengan adanya kebebasan mimbar politik yaitu dengan munculnya Koalisi Sajudis, suatu kelompok anti Uni Soviet dan pro-Kemerdekaan. Sementara itu sejumlah intelektual Lithuania membentuk suatu organisasi yang bertujuan memperjuangkan kemerdekaan negara mereka. Organisasi ini merupakan gerakan bangsa Lithuania bagi pembangunan kembali dimana organisasi ini delalu berkedok mendukung glasnost dan perestroika.

Berbagai demonstrasi dan kejadian simbolis yang terjadi sepanjang tahun 1988 telah membangkitkan gagasan kebangsaan Lithuania, sampai akhir tahun itu perjuangan secara nyata masih berkisar pada usaha pencapaian otonomi ekonomi.

Pada bulan Oktober 1988, Brazaukas, yang cenderung mendukung pembaruan, diangkat menjadi sekretaris pertama Partai Komunis Lithuania.¹⁴ Partai Komunis Lithuania di bawah Brazaukas bersama dengan Sajudis mempunyai peranan penting dalam usaha mencapai kemerdekaan Lithuania.

¹³ "Lithuania," Microsoft (R) Encarta(R) Ensiklopedia(™), 1993 - 1994

¹⁴ Jusac Kantjara, Lithuania Dalam Politik Luar Negeri AS - US, Global : Jurnal Politik Internasional, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal. 17

Tiga aspek dasar dalam perjuangan Lithuania meliputi budaya, ekonomi dan politik. dalam aspek budaya, diperjuangkan penetapan Bahasa Lithuania sebagai bahasa resmi republik, dan pengesahan simbol-simbol tradisional Lithuania seperti bendera, lambang negara dan sebagainya. Dalam aspek ekonomi, diperjuangkan swasembada ekonomi. Baik Partai Komunis Lithuania maupun Sajudis setuju dengan kedua tujuan di atas. Namun dalam aspek politik, Partai Komunis Lithuania cenderung mendukung suatu bentuk kedaulatan terbatas di Lithuania dan menentang segala keputusan yang menyangkut kemerdekaan seperti yang dituntut oleh Sajudis.

Namun pada 1989, Sajudis mulai bertekad untuk memperjuangkan kedaulatan dan menuntut berbagai konsesi politik dari Uni Soviet. Gorbachev menanggapi dengan berbagai penyelesaian politik pula. Dan pada bulan Maret 1989, Sajudis memenangkan 36 kursi dari 42 kursi dalam pemilihan anggota kongres rakyat Uni Soviet. Tanggal 18 Mei 1989 Soviet tertinggi Lithuania menyatakan republik itu sebagai republik berdaulat. Hal ini tentu saja merupakan perkembangan penting karena menandai pula hancurnya Partai Komunis Lithuania. Untuk mengembalikan popularitasnya, Partai Komunis Lithuania memutuskan keluar dari Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) pada bulan Desember 1989.

Dalam menanggapi keinginan tuntutan Lithuania untuk memerdekakan diri, Gorbachev mengambil kebijaksanaan dengan menawarkan konsesi-konsesi yang lebih luas kepada republik itu antara lain peningkatan kontrol terhadap kehidupan

ekonomi. Hal ini juga dilakukan dengan mengadakan kunjungan Gorbachev ke Vilnius, pada bulan Januari 1990.

Pada bulan Februari 1990, Sajudis berhasil memenangkan pemilihan anggota Soviet tertinggi Lithuania dimana dalam pemilihan tersebut Sajudis berhasil memperoleh 75% suara dari keseluruhan kursi badan legislatif republik itu. Menyadari akan semakin kuatnya usaha kemerdekaan Lithuania setelah kemenangan Sajudis ini, Gorbachev kembali berusaha mengajukan penyelesaian politis dengan menyatakan bahwa pemisahan diri setiap republik harus dilakukan melalui Undang-Undang Pemisahan (Secession) yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Namun hal ini justru mendorong Lithuania untuk segera memisahkan diri sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur pemisahan tersebut. Selain itu dalam peraturan baru yang mengatur tentang wewenang presiden dinyatakan bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk menyatakan keadaan darurat di setiap republik. Dengan pertimbangan waktu (timing) tersebut, Soviet Tertinggi Lithuania segera bersidang, dan pada tanggal 11 Maret 1990 Lithuania memproklamasikan kemerdekaannya dan mengangkat Vytautas Landsbergis sebagai ketua Sajudis dan sekaligus sebagai Presiden Lithuania, selain itu ditetapkan pula Kazimiera Prunskiene sebagai Perdana Menteri Lithuania.¹⁵

Menanggapi tindakan Lithuania yang tidak mengindahkan imbauan dari Moskow, Gorbachev segera mengambil tindakan

¹⁵ Martha Brill Olotoff, "The Soviet (Dis) Union," *Foreign Affairs*, Summer 1990, Vol. 69, No. 3, hal.38

tegas terhadap Lithuania yaitu dengan mengadakan embargo ekonomi.¹⁶ Tentu saja hal ini akan membawa dampak pada kehidupan ekonomi Lithuania karena walaupun Lithuania secara relatif lebih produktif daripada Republik-Republik Soviet lain, akan tetapi Lithuania masih sangat tergantung kepada Uni Soviet terutama pada kebutuhan akan gas yang dipotong hingga 16% saja yang diterima oleh Lithuania, juga pasokan bensin yang dihentikan secara total. Menghadapi kenyataan tersebut, pada 17 Maret 1990, Gorbachev mengeluarkan referendum yang memberikan kesempatan kepada republik-republik yang ada untuk menentukan nasibnya lepas atau tetap berada dalam federasi Uni Soviet.

2.2.3.2 LATVIA

Liberalisasi politik di Uni Soviet pada akhir tahun 1980-an ditandai dengan adanya kebangkitan nasionalisme di Latvia. Gerakan nasionalisme Latvia mulai aktif pada tahun 1986 dengan terbentuknya organisasi-organisasi radikal yang sangat berani dalam melaksanakan gerakan untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya yang pernah hilang pada tahun 1940.

Pada tahun 1986 aksi-aksi terbuka kaum oposisi Latvia juga mulai bermunculan seperti di republik lainnya. Aksi-aksi tersebut diwujudkan dalam bentuk demonstrasi kecil-kecilan yang diorganisasikan oleh kelompok Helsinki-86. Organisasi ini semula didirikan oleh hanya tiga orang buruh muda dari kota Liepaja. Demonstrasi yang dilaksanakan pada 11 Maret 1990 sebenarnya terbatas untuk memperingati kemerdekaan Latvia pada 1918, penandatanganan Pakta Molotov-Ribbentrop 1938 dan

¹⁶ Jusso Kartjana, *ibid*, hal. 21

pendeportasian orang Latvia ke Republik Sosialis Rusia pada tahun 1941.¹⁷ Dari sini kemudian memancing munculnya organisasi-organisasi perjuangan kemerdekaan Latvia.

Pada tahun 1988, di Latvia berdiri satu organisasi yang terbentuk melalui konflik terbuka dengan kekuasaan Uni Soviet. Organisasi tersebut melakukan kegiatan bukan hanya oleh orang-orang yang tergabung dalam Popular Front, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang di luar front, dimana kaum radikal tersebut telah mendirikan beberapa kelompok untuk dapat bertukar pikiran di antara mereka. Namun dari semula mereka telah menetapkan satu kemampuan yang luar biasa untuk melanjutkan aliansi mereka, melakukan gerakan secara terpisah untuk mencapai tujuan utama yang sama --- kemerdekaan.¹⁸

Namun dalam perkembangan selanjutnya, para pemimpin pergerakan segera mengadakan pertemuan. Setelah berdebat berulang kali, akhirnya mereka sepakat dan terbetuklah Front Rakyat sebagai organisasi yang membawahi semua gerakan oposisi pada musim panas 1988. Tuntutan kaum oposisi ini semakin berani dan berhasil menarik simpati para pejabat partai dan pemerintah. Pada bulan Pebruari 1990 muncul sebuah organisasi yang bernama Gerakan Kemerdekaan Latvia. Pendirian organisasi tersebut ternyata mendapat sambutan dari Soviet Tertinggi Latvia yang memberikan pernyataan agar organisasi tersebut dibubarkan. Dan pernyataan tersebut dijawab oleh kaum oposisi dengan mengadakan Kongres Istimewa. Di luar dugaan, kongres tersebut ternyata tidak saja dihadiri oleh

¹⁷ "Tiba-tiba Mereka Merasa Berbeda," *Tempo*, 24 Maret 1990

¹⁸ Jan Arveds Trapanis, *Toward Independence: The Baltic Popular Movements*, Westview Press, Boulder, San Fransisco & Oxford, 1991, hal.26

ribuan anggotanya tetapi dihadiri pula oleh orang-orang yang belum tergabung di dalamnya.

Gerakan Kemerdekaan Latvia ini terus berlanjut hingga akhirnya berhasil diproklamasikan kemerdekaan Latvia pada 20 Agustus 1991 dan sekaligus menetapkan hari itu sebagai hari kemerdekaan Latvia.¹⁹ Latvia merupakan republik kedua yang mengesahkan sistem multipartai. Sekitar 75% anggota delegasi ke Kongres Wakil Rakyat di Moskow adalah anggota Front Rakyat.²⁰

2.2.3.3 ESTONIA

Berbeda dengan perjuangan yang dilakukan oleh republik Lithuania, perjuangan menuntut kemerdekaan di republik Estonia tidak seradikal di republik tersebut. Hal tersebut dilakukan karena kaum nasionalis Estonia tidak ingin serangkaian peristiwa buruk yang terjadi di Lithuania terjadi juga di Estonia sehingga mereka memutuskan untuk bersikap tidak konfrontatif. Seperti yang dikatakan oleh redaktur TV Estonia, Uno Masaikas, bahwa orang Estonia lebih berhati-hati daripada orang Lithuania. Walaupun sasaran akhir yang hendak dicapai sama saja, yaitu kemerdekaan Estonia.

Usaha pencapaian kemerdekaan Estonia akan sangat ditentukan dalam kongres pertama Partai Komunis Estonia. Dengan kata lain, Estonia lebih suka mengikuti jalur konstitusional. "Pertama kami akan berunding dengan Soviet

¹⁹ Tri Nuke Pujiastuti, *Rusia Dan Problema Integrasi Politik Soviet*, Global : Jurnal Politik Internasional, 1992, hal. 31

²⁰ "Tibastiba Mereka Merasa Berbeda." *Tetapi*, 24 Maret 1990, hal.

untuk mengambil keputusan politik," tutur Henry Suva, pembantu kepala ideologi partai komunis.²¹

Di Estonia terdapat dua oposisi nasional yang sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Estonia. Dua oposisi tersebut adalah "Popular Front of Estonia," dan "Estonia Citizen's Committee." Kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang terdiri dari kelompok nasionalis yang bersikap demokratis.

Pada 1 April 1990, kelompok nasionalis Estonia meminta Moskow untuk berunding mengenai kemerdekaannya. Permintaan ini dilakukan setelah parlemen memutuskan untuk tidak mengakui pencaplokan Estonia 50 tahun lalu.²² Sebuah delegasi terdiri dari anggota parlemen dan badan yang sederajat akan berunding dengan pemerintah pusat.

Pada tanggal 20 Maret 1990, Ketua Masyarakat Warisan Estonia, Arnold Ruutel disertai sejumlah pemimpin Partai Komunis Estonia mengadakan pertemuan dengan Gorbachev. Dan pada 25 Maret 1990, Partai Komunis Estonia mengikuti jejak Partai Komunis Lithuania yang memisahkan diri dari Partai Komunis Uni Soviet pada pertengahan Desember 1989.

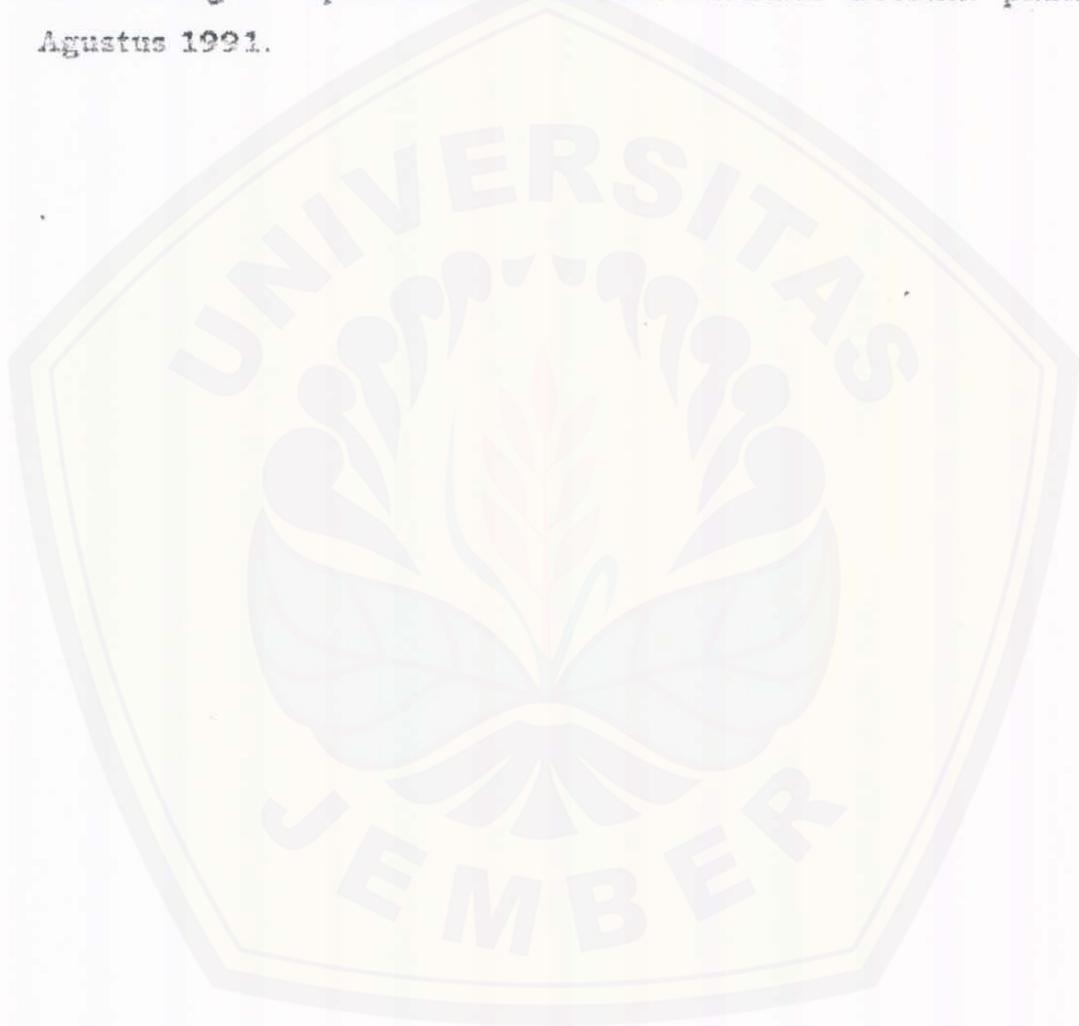
Parlemen Estonia, Jumat 30 Maret 1990, memproklamasikan diri dalam periode transisi menuju kemerdekaan. Namun keputusan tersebut tidak seradikal yang dilakukan Lithuania. Keputusan resmi Partai Komunis Estonia akan diambil enam bulan mendatang setelah Kongres PKUS bulan Juni.

²¹ Tempo, 31 Maret 1990

²² Kompas, 3 April 1990

Menurut Endel Lippma, seorang anggota parlemen Estonia, yang penting bagi Estonia adalah mengubah konstitusi sehingga bisa berakibat kekuasaan Uni Soviet di Estonia tidak sah.²³

Perjuangan kemerdekaan Estonia ini akhirnya membawa hasil dengan diproklamasikan kemerdekaan Estonia pada 19 Agustus 1991.



²³ Kompas, 3 April 1990

BAB III

KEBIJAKAN GORBACHEV

3.1 Gorbachev Sebagai Tokoh Pencetus Reformasi

Reformasi politik yang dilaksanakan di Uni Soviet merupakan satu gagasan yang membangkitkan harapan baru bagi masyarakat Uni Soviet untuk melaksanakan pembaruan yang mereka tunggu-tunggu. Sebenarnya ide pembaruan ini sudah muncul pada masa pemerintahan Yuri Andropov, namun ide tersebut belum dapat direalisasikan dengan baik. Dan pada masa Gorbachev inilah gagasan pembaruan tersebut mendapat momentum yang tepat. Karena pada masa itu para pemimpin partai tidak hanya meyakini Gorbachev sebagai seorang pemimpin muda yang kuat tetapi juga dianggap sebagai sosok yang mampu membawa perubahan-perubahan dan pembaruan dalam masyarakat Uni Soviet terutama dalam sistem perekonomiannya yang sangat merosot.

Gorbachev sebagai tokoh pencetus reformasi di Uni Soviet dikenal sebagai seorang yang memiliki sikap tegas dan pandangan yang jauh ke depan. Ia juga merupakan tokoh yang memiliki pengetahuan yang menonjol dalam hal perekonomian Uni Soviet di samping bidang-bidang lainnya. Kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh Gorbachev ini tidak lepas dari latar belakang kehidupan pribadinya. Gorbachev dilahirkan di tengah keluarga petani pada tanggal 2 Maret 1931, di desa Privolnoye, distrik Krasnogvardeisky wilayah Stavropol di kawasan Kaukasia Utara.¹

Pada usia 15 tahun ia mulai bekerja sebagai operator mesin pada stasiun mesin dan traktor. Setahun setelah Stalin wafat, yaitu saat ia berusia 21 tahun ia menggabungkan diri dalam

¹ Drs. Soepeno Sunardjo, "Mikhail Gorbachev : Tokoh Pembaruan Abad Ini," Pustaka Yayasan 17-8-45, 1990, hal. 9

Partai Komunis Uni Soviet. Dari sinilah ia memulai awal karirnya yang setahap demi setahap ia bangun. Karir politik Gorbachev mulai menonjol saat pimpinan partai dijabat oleh Leonid Breznev, Yuri Andropov dan Konstantin Chernenko. Pada masa kepemimpinan Yuri Andropov, Gorbachev termasuk anggota politbiro yang aktif dan menonjol. Gorbachev dikenal sangat dekat dengan Andropov karena persamaan-persamaan pandangan yang mereka miliki. Bahkan ketika Andropov jatuh pada tahun 1983 dan akhirnya meninggal pada 1984 ia disebut-sebut sebagai orang yang akan menggantikan kedudukan Andropov. Mungkin karena pada waktu itu Gorbachev dianggap terlalu muda maka akhirnya yang menggantikan Andropov adalah Konstantin Chernenko. Namun demikian Gorbachev menjadi orang nomor dua di bawah Chernenko. Gorbachev akhirnya mencapai puncak karirnya dalam politik saat ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PKUS menggantikan Chernenko yang meninggal pada tahun 1985.

Munculnya Gorbachev sebagai orang nomor satu di Uni Soviet tidak terlepas dari peranan Breznev dan Andre Gromyko. Pada tahun 1978, menjelang sidang pleno Komite Sentral PKUS, Breznev meminta pendapat Gromyko untuk menarik Gorbachev ke dalam Sekretariat Komite Sentral PKUS. Menurut Gromyko, Gorbachev yang pada saat itu adalah Sekretaris PKUS di Stavropol, merupakan orang komunis yang *Strightforwarded, honest dan very well trained.*²

Gromyko kemudian mengusulkan agar Breznev mengusulkan pencalonan Gorbachev pada sidang pleno Komite Sentral PKUS. Dengan usul tersebut semakin mempopulerkan nama Gorbachev, yang di kalangan PKUS dinilai sebagai seorang

² Sulastomo, "Perjalanan Mikhail Gorbachev", Kompas, 16 Juli 1990

negarawan, politikus yang berpandangan jauh, dengan pikiran-pikiran yang tajam dan kuat.

Oleh karena itu, pada saat terjadi krisis kepemimpinan PKUS pada tahun 1985 setelah meninggalnya Chernenko, dalam sidang pleno darurat Komite Sentral PKUS atas nama politbiro PKUS, sekali lagi Gromyko mengusulkan Gorbachev menduduki Sekjen PKUS. Dan ternyata sidang pleno Komite Sentral PKUS menerima Gorbachev secara aklamasi.³ Ternyata Gorbachev tidak saja sudah siap menjadi Sekjen PKUS tetapi ia juga sudah siap dengan konsep apa yang akan dilakukan oleh Uni Soviet.

Begitu muncul sebagai orang pertama dalam PKUS, Gorbachev kemudian menerbitkan buku yang berjudul *"Perestroika" (New Thinking for Our Country and The World)*. Buku tersebut tidak saja berisi kritik terhadap PKUS dan Uni Soviet pada umumnya, tetapi juga memuat cita-cita Gorbachev untuk menciptakan suatu masyarakat baru di Uni Soviet. Ia tahu keadaan negaranya yang demikian buruk, sehingga gagasannya untuk mengadakan pembaruan dan perubahan-perubahan di segala bidang menjadi prioritas utama yang akan dilaksanakan secara perlahan dan bertahap. Menurutnya reformasi di bidang ekonomi tidak akan ada artinya apabila tidak diimbangi dengan adanya reformasi politik. Oleh karena itu Gorbachev kemudian melaksanakan program pembaruan-pembaruan dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pantang menyerah dan maju ke depan dalam menghadapi semua persoalan adalah merupakan prinsip hidup Gorbachev. Sikap inilah yang menyebabkan Gorbachev berhasil membawa perubahan-perubahan di Uni Soviet.

³Sulastomo, *ibid*

Karir politik Gorbachev terus menanjak tidak saja dalam partai, tetapi juga merambah sampai kepada kursi kepresidenan yaitu pada tahun 1988 ia terpilih sebagai Presiden Uni Soviet menggantikan Andre Gromyko. Dengan terpilihnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet, Gorbachev semakin mendapat kesempatan untuk merealisasikan gagasannya yaitu Glasnost, Perestroika dan Demokratizatsia yang menawarkan keterbukaan dan kebebasan kepada masyarakat Uni Soviet. Ketika menjabat sebagai Presiden Uni Soviet, pada tahun 1989 untuk pertama kalinya Gorbachev menyelenggarakan Pemilu dengan sistem baru yang akhirnya membawa Gorbachev kembali menduduki jabatan Presiden. Dan akhirnya pada tahun 1990, dalam sidang Presidium Tertinggi PKUS Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet diberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar dalam pemerintahan.

Pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Presiden tidak memiliki kekuasaan yang besar tetapi hanya sebagai simbol saja, sedangkan pemegang kekuasaan terbesar adalah di tangan Sekjen PKUS sebagai pemegang kekuasaan politik praktis sehari-hari dan sebagai pelaksana pemerintahan sehari-hari berada di tangan Perdana Menteri.. Dengan adanya kekuasaan eksekutif yang lebih besar yang dimiliki oleh Presiden, maka Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet akan dapat menjalankan program pembaruan yang dicetuskannya.

3.2 Kebijakan Reformasi Gorbachev

Sebagaimana telah disebutkan bahwa munculnya Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet, telah membangkitkan harapan masyarakat Uni Soviet bagi terciptanya pembaruan yang

belum sempat dilaksanakan pada masa kepemimpinan Yuri Andropov.

Pada kepemimpinan terdahulu, Uni Soviet berada dalam keadaan yang tertutup dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk mengekspresikan harapan dan keinginannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh sejarah Uni Soviet, yaitu sejak kemenangan kelompok Bolshevik pada revolusi 1917 yang menjadi landasan kemenangan Uni Soviet sebagai negara bangsa. Kelompok Bolshevik banyak mendapat dukungan dari masyarakat Uni Soviet karena kepandaian kelompok tersebut menempatkan kepentingan yang sama dengan kepentingan kelompok masyarakat Uni Soviet yang pada saat itu ingin melepaskan diri dari tekanan Tsar. Dari kemenangan kelompok Bolshevik inilah yang menandai dimulainya kekuasaan Partai Komunis di Uni Soviet. Selama partai komunis berkuasa, pemerintahan yang dijalankan di Uni Soviet cenderung tertutup dan anti bangsa asing (*xenophobia*), terutama bangsa barat. Pemerintahan Uni Soviet yang tertutup ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahnya, mereka hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Pemerintah Uni Soviet yang bersikap anti bangsa asing juga tidak mau meminta bantuan kepada negara lain kecuali negara-negara yang sepaham dengan Uni Soviet. Keadaan tersebut berlangsung terus dari masa pemerintahan Lenin sampai masa pemerintah Breznev. Baru pada masa pemerintahan Yuri Andropov, pengganti Breznev, muncul gagasan pembaruan terhadap sistem yang berlaku selama ini. Namun gagasan tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, karena Yuri Andropov meninggal setelah memerintah kurang lebih 15 bulan. Setelah

meninggalnya Andropov, ia diganti oleh Konstantin Chernenko yang ternyata dalam pemerintahannya ia menggunakan sistem yang diterapkan Breznev daripada melanjutkan program pembaruan yang diterapkan oleh Andropov. Pada masa pemerintahan Chernenko ini program pembaruan di Uni Soviet kembali mengalami hambatan, dan harapan masyarakat Uni Soviet akan adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka juga padam kembali hingga akhirnya muncul tokoh pembaruan Uni Soviet yaitu Mikhail Sergeyevic Gorbachev.

Sebagai pengganti pemimpin-pemimpin terdahulu, Gorbachev menyadari bahwa ia mewarisi kondisi yang buruk. Pada masa kepemimpinan terdahulu, dengan sistem pemerintahan yang tertutup, Uni Soviet mengalami kemunduran terutama dalam bidang ekonomi yang antara lain disebabkan oleh sistem perekonomian gaya Stalin yang masih juga diterapkan pada masa pemerintahan Breznev dimana dalam penerapannya perekonomian dikendalikan secara terpusat dengan satu sistem birokrasi yang memiliki garis kewenangan vertikal yang sangat ketat.

Selain dalam bidang ekonomi, Uni Soviet juga mengalami ketertinggalan yang cukup jauh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibanding negara-negara barat. Hal tersebut terjadi karena Uni Soviet cenderung mengembangkankan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong/mendukung kemajuan militernya.

Di samping ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di Uni Soviet juga terjadi kemerosotan di bidang sosial. Menurunnya disiplin nasional, banyaknya korupsi dan tingginya tingkat kriminalitas merupakan contoh adanya krisis sosial yang terjadi di Uni Soviet. Problem sosial ini ternyata pada akhirnya berkembang menjadi problem politik dimana terjadi pula kemerosotan sosial di kalangan para birokrat; munculnya berbagai

penyalahgunaan wewenang, tingginya tingkat korupsi dan tingkat disiplin yang merosot tajam.

Terjadinya kemerosotan baik di bidang ekonomi, sosial dan politik inilah yang kemudian mendorong Gorbachev untuk mengadakan pembaruan dan perubahan-perubahan secara radikal dan fundamental dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Dengan munculnya Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet, maka akan memberi kesempatan kepada Gorbachev untuk menjalankan program pembaruan yang dicetuskannya. Dalam program pembaruannya itu Gorbachev menginginkan untuk mentransformasikan ekonomi Uni Soviet yang tengah terpuruk dan dalam kondisi yang sangat buruk menuju pada keadaan yang lebih baik dengan jalan menyetatkan dan mengadakan pembangunan di bidang perekonomian secara intensif dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling modern sehingga akhirnya akan dapat membawa Uni Soviet pada posisi yang terhormat dan sejajar dengan negara-negara besar di dunia internasional sebagai negara yang kuat dan maju.

3.3 Wujud Reformasi di Uni Soviet

Kondisi dalam negeri yang sangat buruk akibat kemerosotan dalam berbagai bidang dan ketertinggalan yang sangat jauh dibanding negara-negara barat, mendorong Uni Soviet untuk membuka diri terhadap dunia luar, karena sikap menutup diri dari dunia luar yang diterapkan semenjak Revolusi Bolshevik ternyata merupakan penyebab utama terjadinya kemerosotan baik di bidang ekonomi maupun bidang politik di Uni Soviet dan menurunnya posisi Uni Soviet di mata internasional. *Foreign Circumstances* yang makin maju itulah yang mendesak perlunya diadakannya transformasi radikal dan fundamental, dan itu

berarti membuka diri kalau tidak mau terus ketinggalan. Itulah esensi dari *Glasnost, Perestroika dan Demokratizatsia*.⁴

3.3.1 Perestroika

Perestroika atau restrukturisasi merupakan bagian dari program pembaruan Gorbachev yang menurutnya merupakan satu kebutuhan yang sangat mendesak guna melaksanakan pembangunan besar-besaran dalam masyarakat Uni Soviet.

Sebenarnya Perestroika adalah perwujudan dari restrukturisasi perekonomian yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Uni Soviet. Dalam program Perestroika ini terdapat beberapa prinsip mengenai perubahan radikal dalam manajemen ekonomi, seperti gaya, sikap dan metode kerja dalam rangka penataan kembali perekonomian Uni Soviet setelah mengalami kehancuran.

Menurut Gorbachev, Perestroika berarti mengatasi proses stagnasi, mematahkan mekanisme pengereman, menciptakan mekanisme yang dapat diandalkan dan efektif demi akselerasi kemajuan sosial dan ekonomi dan memberikan dinamisme yang lebih besar. Perestroika merupakan intensifikasi menyeluruh perekonomian Uni Soviet, kebangkitan kembali dan pengembangan prinsip-prinsip sentralisme demokratis dalam mengelola perekonomian negara serta pengenalan metode ekonomi universal.⁵

Reformasi Gorbachev dalam bidang ekonomi didasari oleh adanya restrukturisasi mekanisme sistem ekonomi dan mengadakan intensifikasi yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang lebih

⁴ Alfian, "Pembaruan Gorbachev : Makna Ideologis dan Dampaknya di Uni Soviet dan Eropa Timur," dalam Dwi Susanto dan Zaimuddin Djafar, *Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 72

⁵ Mikhail Gorbachev, *Perestroika : Pemikiran Baru Untuk Negara Kami Dan Dunia*, (PT. Gelora Aksara Pratama, 1987), hal.17

tinggi yang akhirnya akan dapat merangsang peningkatan ekonomi di semua bidang.⁶

Perestroika berarti pula pembersihan masyarakat dari distorsi etika sosialis, pelaksanaan secara konsisten prinsip-prinsip keadilan sosial. Perestroika adalah peninggian martabat tenaga kerja yang jujur dan benar-benar memenuhi syarat, penanggulangan terhadap kecenderungan penyamarataan dalam upah dan sikap konsumerisme.⁷

Selain itu Perestroika juga berarti pengembangan menyeluruh demokrasi, pengobaran semangat upaya berprakarsa dan kreatif, serta penghargaan atas prestasi individu.

Dari substansi Perestroika di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa untuk melaksanakan program Perestroika diperlukan adanya dukungan dari masyarakat. Namun dukungan dari masyarakat saja tentu belum cukup, pelaksanaan program Perestroika juga menuntut inisiatif, kreativitas serta partisipasi aktif dari semua kalangan warga negara Uni Soviet. Sedangkan tumbuhnya inisiatif, kreativitas dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat dijamin apabila terdapat adanya keterbukaan pada semua pihak terhadap kritik dan opini publik.

Adanya keterbukaan dan penerimaan terhadap kritik dan opini publik serta adanya jaminan terhadap adanya sikap kritis merupakan esensi dari program pembaruan Gorbachev selanjutnya yaitu *Glasnost*.

3.3.2 Glasnost

Glasnost sering diterjemahkan sebagai openness (keterbukaan) atau publicity (publisitas). Secara bebas Glasnost bisa diartikan sebagai kebijaksanaan yang melonggarkan

⁶ Ibid, hal.

⁷ Ibid, hal. 18

kebebasan menyatakan pendapat.⁸ Glasnost dapat pula dipandang sebagai pengawasan publik yang aktif terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah.⁹ Program Glasnost ini dimaksudkan untuk memudahkan pencapaian program Perestroika, dalam usaha penciptaan demokratisasi. Sebab restrukturisasi sistem perekonomian yang tengah dilaksanakan tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan fundamental dalam kehidupan sosial dan kultural di Uni Soviet. Dengan hadirnya Glasnost, dapat dipakai sebagai salah satu cara untuk mengurangi alienasi yang dirasakan oleh kaum intelektual dan kaum buruh yang cakap agar mereka dapat mengambil bagian dalam proses peremajaan sistem ekonomi negaranya.¹⁰

Menurut Gorbachev, Glasnost dipandang sebagai cara untuk mengumpulkan berbagai pandangan yang berbeda yang mencerminkan semua kalangan, bidang dan profesi dalam masyarakat Uni Soviet. Glasnost juga merupakan pre kondisi dari demokrasi yang kemudian akan digunakan sebagai pedoman ataupun jaminan pembaruan di Uni Soviet.¹¹

Dalam kenyataannya, Glasnost dimanifestasikan dalam bentuk kehidupan resmi terhadap kritik publik dan adanya kebebasan berdiskusi tentang politik dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, serta adanya kebebasan dalam media massa. Glasnost atau keterbukaan ini dimaksudkan pula untuk menghilangkan kekakuan sikap pemerintah dan partai serta mengembalikan fungsi-fungsi pers sebagaimana mestinya. Untuk mengembangkan dan memudahkan pencapaian program Perestroika amat diperlukan adanya dukungan dari masyarakat.

⁸ David E. Powel, "Soviet Glasnost Definition and Dimention," *Curent History*, Okt. 1988, hal.321

⁹ David E. Powel, *ibid*

¹⁰ Wiratono Soekito, "Krisis Ideologi Komunis dalam Pergolakan di Uni Soviet dan Eropa Timur," dalam Dwi Susanto dan Zaimuddin Djafar, *op.cit*, hal. 9

¹¹ David E. Powel, *op.cit*, hal.322

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam kebijaksanaan Glasnost ini antara lain adalah adanya hak yang tidak dapat dicabut bagi setiap warga negara untuk mendapatkan informasi penuh dan otentik, selain rahasia-rahasia negara dan militer, yaitu mengenai urusan-urusan umum. Selain itu termasuk juga hak untuk membahas persoalan apapun yang berarti penting secara terbuka dan bebas.¹²

Dengan kebijaksanaan Glasnost ini pula diharapkan akan mampu menekan kelemahan yang muncul dari birokrasi politik Uni Soviet. Karena Glasnost juga merupakan bentuk pengawasan publik yang efektif atas kegiatan semua instansi pemerintah, tanpa pandang bulu dan pendongkrak kuat untuk memperbaiki kelemahan.¹³ Jadi secara umum, Glasnost diharapkan mampu diterapkan dalam semua bidang kehidupan masyarakat.

3.3.3 Demokratizatsia

Bertolak dari latar belakang sejarah Uni Soviet yang selalu tertutup dan terpusat, maka Gorbachev berpandangan bahwa demokratisasi sangat penting bagi Uni Soviet. Pentingnya demokrasi ini dinyatakan Gorbachev pada sidang Partai Komunis Uni Soviet pada bulan Januari 1987¹⁴

"We need democracy as much as we need air, is firm in its conviction that people should know everything. Openness, criticism and self criticism and control carried out by the masses will guarantee the healthy development of our country"

Bahwa pada dasarnya masyarakat Uni Soviet sangat memerlukan demokrasi dalam kehidupan mereka sebagaimana manusia memerlukan udara. Keterbukaan, kritik dan kritik

¹² Mikhail Gorbachev, Tokoh Pembaruan Abad Ini, op.cit, hal. 89-81

¹³ Mikhail Gorbachev, "Perestroika : Pemikiran Baru Untuk Negara Kami Dan Dunia", op.cit, hal.50-51

¹⁴ David E. Powel, op.cit, hal. 21

terhadap diri sendiri, dan kontrol yang dilakukan masyarakat akan menjamin pembangunan yang sehat.

Demokratisasi ternyata telah membangkitkan kembali semangat rakyat Uni Soviet dalam membangun ekonomi dan sekaligus menunjukkan bahwa yang salah bukanlah komunisme sebagai nilai dasar, tetapi para pelaksana ideologi itulah yang salah, sehingga melakukan suatu ideopraktis yang menyimpang dari ideologi sebagai nilai dasar.¹⁵ Dengan kebijaksanaan ini, diharapkan akan terjadi perombakan-perombakan dalam bidang struktur sosial, politik dan kepemimpinan. Program ini didasari oleh adanya upaya untuk mengurangi monopoli kekuasaan oleh PKUS dan berupaya untuk mengalihkan sebagian kekuasaan kepada rakyat melalui badan-badan perwakilan. Menurut Gorbachev, semua kesulitan yang dihadapi oleh Uni Soviet akan dapat diatasi apabila proses demokrasi di Uni Soviet dapat dijalankan dengan baik. Karena demokrasi merupakan jaminan proses reformasi yang berlangsung tersebut tidak dapat diubah-ubah.¹⁶

Adapun usaha yang dilaksanakan oleh Gorbachev guna mengembangkan demokrasi Uni Soviet, ia merasa perlu mengadakan perubahan terhadap sistem pemilihan dalam parlemen. Selain itu ia juga menginginkan adanya posisi yang lebih kuat bagi lembaga legislatif dan sekaligus lembaga yang mampu menjalankan fungsinya untuk mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berarti pula secara tidak langsung dan bertahap akan mengurangi peran PKUS yang selama ini mendominasi kekuasaan di Uni Soviet. Akhirnya demokrasi yang dikembangkan dan dijalankan di Uni Soviet akan dapat

¹⁵ Abdullah Saleh, *Gorbachev dan Perestroikanya : Suatu Analisis*, dalam Dwi Susanto dan Zaimuddin Djafar, *op.cit*, hal. 20

¹⁶ Mikhail Gorbachev, *"Perestroika : Pemikiran Baru Bagi Negara Kami Dan Dunia"*, *op.cit*, hal.15

mendorong terlaksananya Perestroika dengan baik sehingga pemerintah bersama rakyat Uni Soviet akan mampu mengatasi masalah yang mereka hadapi.



BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN GORBACHEV

4.1 KRISIS NASIONAL DAN REFORMASI DI UNI SOVIET

4.1.1 Latar Belakang Terjadinya Krisis Nasional

Sejarah berdirinya negara Uni Soviet dimulai dengan adanya Revolusi Bolshevik pada 1917. Semenjak kemenangan kelompok Bolshevik, kekuasaan dipegang oleh tentara merah dan Bolshevik menjadi partai tunggal. Kemenangan kelompok Bolshevik ini tidak lepas dari peran Jerman yang membantu kelompok Bolshevik dalam melaksanakan revolusinya. Selain itu kemenangan kelompok Bolshevik juga didukung oleh adanya kemampuan propaganda kelompok Bolshevik yang menyatakan bahwa partai Bolshevik merupakan partai milik rakyat yang mengabdikan pada kebebasan demokrasi, keadilan sosial dan menentang semua bentuk reaksi serta ketidak-adilan sosial. Dari pernyataan tersebut tentu saja kelompok/partai Bolshevik mampu menarik simpati dan mendapat banyak dukungan dari rakyat. Dengan berkuasanya kelompok Bolshevik di bawah pimpinan Lenin, timbulnya perang saudara antara kaum Bolshevik dengan kekuatan-kekuatan yang menentang kekuasaan kaum Bolshevik. Perang saudara ini segera melibatkan intervensi negara-negara Barat sekutu Rusia dalam Perang Dunia I melawan Jerman.¹

Seringnya terjadi perang saudara dan banyaknya kelompok yang menentang Bolshevik, menjadikan pemerintahan di bawah pimpinan Lenin pada waktu itu dihadapkan pada berbagai masalah seperti pembenrontan, disintegrasi, kekurangan makan dan sebagainya. Untuk mengatasi persoalan tersebut Lenin menerapkan langkah-langkah yang juga mendapat dukungan dari Cheka atau

¹ J. Soedjati Djiwandono, "Pembangunan Sosialisme dan Perbaruan di Uni Soviet," dalam Analisa, 1987-6, hal. 538

sabotase. Selain itu dalam bidang ekonomi Lenin menerapkan satu kebijakan yang dikenal dengan "Model Soviet."³ Kebijakan ekonomi ini memiliki ciri-ciri yaitu pertama, memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan industri berat dengan maksud untuk secepatnya memperkuat militernya. Dan ternyata ciri pertama ini banyak ditiru oleh negara-negara sekutu Soviet di Eropa Timur. Bagi Uni Soviet, penekanan pada industri berat yang mendukung militernya tersebut tidak menjadi masalah. Karena Uni Soviet merupakan negara yang kaya akan sumber bahan-bahan mentah dan energi yang bisa mendukung industrinya. Sedangkan bagi negara-negara sekutu Uni Soviet di Eropa Timur miskin akan bahan mentah, seperti Yugoslavia, Hungaria dan Ceko-Slovakia dimana akhirnya negara-negara tersebut mengambil langkah-langkah penyesuaian.

Ciri kedua kebijakan ekonomi model soviet adalah, bahwa struktur produksi diasingkan dari struktur permintaan. Hal ini karena adanya pengaruh politik yang besar dalam menentukan kebijaksanaan ekonomi. Target ditetapkan oleh pembuat rencana nasional, baik itu dalam Partai Komunis atau dalam birokrasi. Hal ini membawa akibat sering terjadinya kelebihan atau kekurangan produksi yang disebabkan oleh tidak adanya hubungan dengan struktur permintaan. Di dalam permodalan, seorang manajer suatu perusahaan negara di Uni Soviet tidak perlu memikirkan masalah modal, sebab alokasi modal diatur secara nasional. Dan apabila nantinya terdapat keuntungan maka keuntungan tersebut akan diambil oleh negara sebagai pajak, akibatnya tidak dapat membantu memberikan insentif bagi karyawan. Hal-hal inilah yang menyebabkan tidak efisiennya sistem produksi di Uni Soviet.

Adanya ketertinggalan-ketertinggalan di dalam pembangunan infrastruktur karena adanya perhatian yang berlebihan kepada produksi merupakan konsekuensi selanjutnya dari "model soviet." Sebagai contoh adalah produksi listrik per kapita yang rendah.

³ Heru U. Kuntjorojakti, "Runtuhnya Leninisme, Industrialisasi dan Hegemoni Uni Soviet," Global No. 3 Tahun 1992, hal.3-4

Namun ternyata "model soviet" ini membawa dampak terhadap usaha Uni Soviet untuk mempertahankan posisi hegemoninya di dunia internasional. Terjadinya kesulitan ekonomi yang kemudian membawa dampak politik, yang bukan saja oleh produksi yang tidak efisien, tetapi juga oleh kegagalan pemerintah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga selalu terjadi defisit dalam perdagangan internasional. Demi mengejar target-target politik, akhirnya membawa dampak harus dikorbankannya rakyat dengan ditekannya tara⁴ hidup rakyat. Kebutuhan hidup rakyat diabaikan demi kekuatan industri dan kekuatan militer.

Dari sini dapat kita lihat bahwa sistem ekonomi Uni Soviet merupakan sistem ekonomi yang memiliki ciri bahwa negara (dan bukan swasta) memiliki dan menguasai hampir semua sarana produksi seperti tanah, pabrik dan peralatan produksi, sedangkan keputusan-keputusan pokok mengenai penggunaan masukan-masukan dalam proses produksi dan produksi barang-barang dan jasa yang harus dihasilkan, diambil oleh suatu badan perencanaan pusat (gosplan).

Pada tahap-tahap awal pemerintahannya, Lenin tidak berhasil melaksanakan transisi dari "ekonomi borjuis" ke "sistem ekonomi sosialis." Yang dapat dilaksanakan adalah terutama menghancurkan kekuatan ekonomi pemilik tanah feodal dan kekuatan ekonomi borjuis daripada meletakkan dasar-dasar ekonomi masa depan. Dan langkah-langkah yang diambil dalam periode itu tidak banyak kaitannya dengan sosialisme-komunisme dalam pengertian Karl Marx.⁴

Untuk mengatasi segala macam kekalutan yang dihadapi seperti pemberontakan, disintegrasi, masalah angkatan bersenjata, kekurangan makan terutama di kota-kota sebagai akibat merosotnya produktivitas pertanian dan hancurnya sistem transportasi oleh perang dan merosotnya produktivitas semi industri, Lenin mengambil

⁴ Zbigniew Brzezinski, "Kegagalan Besar : Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh," (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 20

jasa yang harus dihasilkan, diambil oleh suatu badan perencanaan pusat (gosplan).

Pada tahap-tahap awal pemerintahannya, Lenin tidak berhasil melaksanakan transisi dari "ekonomi borjuis" ke "sistem ekonomi sosialis." Yang dapat dilaksanakan adalah terutama menghancurkan kekuatan ekonomi pemilik tanah feodal dan kekuatan ekonomi borjuis daripada meletakkan dasar-dasar ekonomi masa depan. Dan langkah-langkah yang diambil dalam periode itu tidak banyak kaitannya dengan sosialisme-komunisme dalam pengertian Karl Marx.⁴

Untuk mengatasi segala macam kekalutan yang dihadapi seperti pemberontakan, disintegrasi, masalah angkatan bersenjata, kekurangan makan terutama di kota-kota sebagai akibat merosotnya produktivitas pertanian dan hancurnya sistem transportasi oleh perang dan merosotnya produktivitas semi industri, Lenin mengambil serangkaian langkah yang dimaksudkan untuk mengatur kembali negara yang hancur oleh peperangan dalam usaha mempersatukan negara dalam menghadapi perang saudara.

Dalam kongres ke-10 PKUS pada tahun 1921, ditetapkan langkah-langkah pembaruan melalui Kebijakan Ekonomi Baru (NEP - New Economic Policy). Kebijakan ini dimaksudkan sebagai tanggapan atas kekacauan dan perlawanan yang luas di kalangan rakyat sebagai akibat kebijaksanaan komunisme perang yang luas dan represif.

Dengan NEP pemerintah berusaha menciptakan mata uang yang stabil dan memperkenalkan sistem upah baru dalam dunia

⁴ Zbigniew Brzezinski, "Kegagalan Besar : Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh," (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1990), hal. 20

industri yaitu dalam bentuk uang kontan. Keuntungan menjadi pendorong utama kehidupan ekonomi dan negara tidak lagi memiliki prioritas dalam memperoleh barang-barang. NEP bagi banyak masyarakat Uni Soviet dianggap sebagai puncak pasang keberhasilan dalam sejarah Uni Soviet selama ini, yang meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi dan budaya bahkan mungkin juga politik. Namun usaha Lenin tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal sampai Lenin meninggal.

Setelah meninggalnya Lenin, pembangunan sosialisme di Uni Soviet dilanjutkan oleh Stalin yang memerintah dari tahun 1924-1953. Pada masa kepemimpinan Stalin ini kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan adalah berupa modernisasi dan revolusi.⁵ Maksud dari modernisasi di sini adalah usaha industrialisasi negara sambil menciptakan sistem pertanian sosialis yang dapat mendukung perkembangan industri. Sedang revolusi berarti perubahan total ekonomi bangsa. Perubahan ini meliputi percepatan pertumbuhan industri dan kolektivisasi pertanian yang mulai dilaksanakan mulai tahun 1929.

Selanjutnya kebijaksanaan ekonomi NEP diganti dengan kebijaksanaan Rencana Lima Tahun Pembangunan Ekonomi dengan titik berat pada industri berat untuk menjamin kekuatan militer Uni Soviet. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Stalin adalah sistem pertanian kolektif *Kolkhoz* dan *Sovkhoz*.⁶ Stalin tidak mengira dan tidak mengantisipasi bahwa tiap petani *kolkhoz* berharap bahwa bukan dia yang bekerja keras untuk memenuhi target yang ditentukan oleh pemerintah, melainkan temannya, karena tidak ada

⁵ Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta, PT. Cipta Adi Pustaka, 1991), hal.61

⁶ *Kolkhoz* (*kollektivnee khozjajstvo* : manajemen kolektif) adalah sistem pertanian kolektif ala Soviet sedang *Sovkhoz* (*sovetskoe khozjajstvo* : manajemen soviet) adalah unit pertanian milik negara, *ibid*, hal.

insentif bagi hasil kerja keras. Sebagai hasil dari kebijaksanaan ini jauh dari apa yang diharapkan.

Dengan gagalnya kebijaksanaan tersebut, menyebabkan elit Uni Soviet mulai meragukan kebijaksanaan ekonomi Stalin. Keraguan tersebut terjawab dengan dilakukannya kontrol politik yang ketat dan disembarkannya teror. Petani dipaksa dengan kekerasan agar bekerja di kolkhoz sehingga banyak menimbulkan korban jiwa.

Pada era Stalin ini juga terjadi pengagungan negara dan penggunaan kekuasaan sebagai alat untuk rekonstruksi sosial mencapai puncaknya. Segala sesuatu harus tunduk kepada pribadi sang diktator dan negara yang dikomandonya.⁷ Kondisi ini ditunjang oleh adanya suatu sistem teror dimana tidak seorang individupun yang aman darinya, termasuk teman-teman dekat Stalin sendiri. Dan pada masa pemerintahan Stalin ini juga diterapkan kebijakan perluasan wilayah.

Walaupun dalam pemerintahan Stalin banyak menelan korban, namun banyak pengamat Barat yang menilai bahwa Stalin sangat berjasa dalam memajukan Uni Soviet. Menurut para pengamat Barat tersebut Stalin dianggap lebih berjasa karena mengindustrialisasikan Uni Soviet daripada melakukan teror di negaranya. Era Stalin diinterpretasikan secara luas sebagai era perubahan sosial yang mendasar, era mobilitas ke atas yang cepat era peralihan dari perekonomian pedesaan menuju perekonomian perkotaan. Di bawah Stalin pula Uni Soviet menjadi satu kekuatan industri besar.⁸

Setelah Stalin meninggal pada tahun 1953, ia digantikan oleh Malenkov. Namun pada tahun 1955 Malenkov dipaksa turun dan

⁷ Zbigniew Brzezinski, "Kegagalan Besar : Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh," (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1990), hal.20

⁸ Zbigniew Brzezinski, *Kegagalan Besar*, *ibid*, hal. 26

digantikan oleh Khrushchev. Khrushchev yang terang-terangan menentang kebijaksanaan Stalin melakukan "destalinisasi" yang tercermin dalam program-program partai yang kembali pada ajaran Lenin.

Pada masa Khrushchev dilakukan perombakan-perombakan dalam beberapa aspek. Khrushchev memperbaiki "koeksistensi damai" dan melancarkan kampanye yang menentang "kultus individu" yang berlangsung selama pemerintahan Stalin. Dalam pemerintahan Khrushchev ini juga dilaksanakan usaha perbaikan taraf hidup masyarakat misalnya dengan meningkatkan harga hasil-hasil produk pertanian.

Namun pemerintahan Khrushchev ini juga tidak berlangsung lama. Karena beberapa kebijakan Khrushchev dinilai tidak memuaskan oleh Komite Sentral, sehingga hal tersebut menyebabkan Brezhnev mengambil alih kekuasaan secara paksa dan menggantikan Khrushchev.

Pada era Brezhnev ditandai dengan adanya usaha peredaan ketegangan Barat-Timur. Di bawah kepemimpinan Brezhnev, Uni Soviet mengembangkan diri menjadi negara 'super power' menyaingi Amerika Serikat. Namun hal ini harus dibayar dengan pengorbanan di dalam negara uni Soviet itu sendiri. Para pengamat Barat menilai periode Brezhnev ini sebagai "periode stagnasi."⁹

Kendala yang dihadapi oleh para pengganti Khrushchev adalah kondisi perekonomian yang buruk sebagai warisan pada jaman Stalin. Dimana beberapa sektor ekonomi Uni Soviet seperti perumahan, pertanian, jasa dan sebagainya tidak mengalami

⁹ Zbigniew Brzezinski, "Kegagalan Besar : Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh," *ibid*, hal.

pertumbuhan seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi pula pada era Brezhnev.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Brezhnev ternyata juga tidak banyak memberikan sumbangan bagi perbaikan keadaan ekonomi nasionalnya. Sebagaimana pendahulunya, Brezhnev ternyata juga lebih condong memberikan prioritas terhadap upaya untuk mengembangkan kapabilitas militer dan memperbesar pengaruhnya guna meningkatkan prestige Uni Soviet di arena internasional.¹⁰

Namun sayang bahwa keberhasilan Brezhnev dalam mengembangkan Uni Soviet menjadi salah satu negara besar dan sejajar dengan Amerika Serikat terutama di bidang pertahanan dan keamanan tidak diimbangi dengan upaya untuk memperbaiki situasi dan kondisi domestik terutama di bidang ekonomi. Menjelang akhir tahun 1970-an, Uni Soviet mulai kehilangan momentum. Kesulitan mulai menumpuk dan semakin memburuk, sebagai fenomena yang bertentangan dengan sosialis mulai muncul dalam kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi dan sosial yang terjadi di Uni Soviet semakin diperburuk dengan terjadinya korupsi besar-besaran di kalangan elit.

Setelah Leonid Brezhnev meninggal pada bulan November 1982, Yuri Andropov, mantan ketua KGB terpilih sebagai pemimpin tertinggi di Uni Soviet menggantikan kedudukan Brezhnev. Munculnya Andropov sebagai pengganti Brezhnev ini tentu saja sekaligus mewarisi kondisi dalam negeri yang buruk dari pendahulunya.

¹⁰ Zbigniew Brzezinski, "Kegagalan Besar : Muncul dan Runtuhnya Komunisme dalam Abad Kedua Puluh," *ibid*, hal.

Namun ternyata naiknya Andropov dinilai oleh pengamat akan membuka peluang bagi pembangunan di Uni Soviet. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Andropov untuk mengatasi masalah-masalah di dalam negeri, dinilai sebagai isyarat adanya upaya reformasi baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama ditujukan pada masalah perbaikan kondisi dalam negeri termasuk masalah korupsi dan rendahnya tingkat produktivitas di negaranya. Langkah-langkah yang diambil oleh Andropov ini ternyata mendapat dukungan dari sebagian anggota politbiro sehinggalah tersebut mempermudah usaha-usaha Andropov.

Namun sebelum langkah-langkah positif yang diambil oleh Andropov tersebut dioperasionalkan secara penuh, Andropov meninggal dalam masa pemerintahannya. Akan tetapi paling tidak Andropov telah meletakkan tonggak-tonggak reformasi di Uni Soviet.

Sepeninggal Andropov, golongan tua dalam politbiro menunjuk Konstantin Chernenko sebagai pemimpin baru menggantikan Yuri Andropov. Namun pemerintahan di bawah Chernenko ini tidak berlangsung lama. Karena alasan kesehatan, Chernenko tidak dapat melaksanakan jalannya pemerintahan dengan baik.

Pada masa Chernenko, tonggak-tonggak reformasi yang telah diletakkan oleh Andropov dimentahkan kembali. Karena pada masa Chernenko ini, ia lebih memilih menerapkan kebijakan-kebijakan yang dipakai pada era Brezhnev daripada melanjutkan program reformasi yang dilaksanakan oleh Andropov. Hingga akhirnya muncul Gorbachev, seorang tokoh muda dalam politbiro yang menggantikan Chernenko. Pada era Gorbachev inilah tonggak-tonggak reformasi

masa Andropov dihidupkan kembali dan berusaha untuk diwujudkan oleh Gorbachev.

4.1.1.2 Faktor-faktor Yang Mendorong Terjadinya Krisis Nasional

Dari uraian mengenai latar belakang terjadinya krisis nasional yang terjadi di Uni Soviet tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis tersebut.

Adapun beberapa faktor yang mendorong terjadinya krisis nasional Uni Soviet adalah adanya warisan dari para pemimpin terdahulu yaitu keadaan ekonomi, sosial dan politik yang buruk. Dapat dijelaskan di sini faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya krisis nasional di Uni Soviet yaitu :

1. Adanya Sistem Terpusat

Selama hampir 70 tahun, kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Uni Soviet menganut sistem yang terpusat. Dengan sistem yang terpusat, berarti kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Uni Soviet dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak ada kebebasan bagi masyarakat Uni Soviet untuk mengemukakan pendapat ataupun dalam partisipasi politik. Selain itu terdapat adanya kekuasaan yang terpusat pula yaitu oleh Partai Komunis Uni Soviet.

Sistem terpusat dalam ekonomi menyebabkan setiap wilayah di Uni Soviet tidak dapat menentukan sendiri produk yang sesuai dengan potensi wilayah yang bersangkutan. Hal ini tentu saja akan mengurangi tingkat produktivitas yang nantinya akan berpengaruh pula terhadap tingkat produksi nasional (GNP). Dengan GNP yang semakin menurun dari waktu ke waktu, akhirnya membawa akibat timbulnya stagnasi dan kemandekan dalam perekonomian Uni Soviet. Semua ini terjadi karena adanya program pengereman

terhadap produksi karena sumber daya yang dimiliki Uni Soviet telah dieksploitasi pada masa sebelumnya.

2. Rendahnya Tingkat Kedisiplinan

Sistem sentralistis dalam bidang birokrasi menyebabkan tindakan yang cenderung diktator di kalangan birokrat. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku para birokrat. Banyak terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi di kalangan birokrat.

Kedua ini tentu saja membawa pengaruh yang buruk terhadap pamor pemerintah Uni Soviet baik di dalam negeri maupun di lingkungan internasional. Kondisi buruk dalam birokrasi inilah yang kemudian menyulut adanya rasa tidak puas di kalangan masyarakat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat ini akhirnya menyebabkan timbulnya protes-protes walaupun pada waktu itu belum dilakukan secara terang-terangan. Selain masalah-masalah dalam birokrasi, juga terjadi kemerosotan sosial dalam masyarakat Uni Soviet. Rendahnya tingkat kedisiplinan, tingginya tindak kriminal juga terjadi di dalam masyarakat. Masalah-masalah ini semakin memprihatinkan terutama pada masa pemerintahan Brezhnev.

3. Masalah Politik

Politik isolasi yang dianut oleh Uni Soviet selama kurang lebih 70 tahun telah menyebabkan Uni Soviet terasing dari percaturan politik internasional. Pada masa sebelum reformasi, Uni Soviet tidak mau menjalin hubungan dengan negara lain yang tidak sepaham termasuk dalam hubungan dagang. Uni Soviet hanya menjalin hubungan dengan negara-negara satelitnya. Hal ini menyulitkan Uni Soviet untuk mendapatkan modal guna melaksanakan pembangunan negaranya, apalagi selama masa Perang Dingin energi dan dana yang

dimiliki oleh Uni Soviet banyak terserap untuk mensupport negara-negara satelitnya di Eropa Timur.

Beberapa faktor di atas merupakan penyebab utama terjadinya krisis nasional yang akhirnya mendorong Gorbachev untuk melaksanakan pembaruan di Uni Soviet guna memperbaiki kondisi dalam negeri Uni Soviet yang mengalami kemunduran sebagai warisan dari pemimpin terdahulunya.

4.1.2 REFORMASI DI UNI SOVIET

Didorong oleh adanya warisan dari pemimpin terdahulu yaitu kondisi dalam negeri yang sangat buruk terutama dalam bidang ekonomi, menyebabkan Gorbachev berusaha melaksanakan reformasi atau pembaruan di Uni Soviet. Gagasan ini dicetuskan pertama kali ketika Gorbachev terpilih sebagai pemimpin Uni Soviet pada bulan Maret 1985.

Pada tahun 1985-1986, Gorbachev memulai reformasinya dengan menekankan pada perombakan struktur perekonomian dan pertumbuhan inovasi teknologi. Reformasi politik Uni Soviet sendiri pada intinya bertujuan menata kembali sekaligus memperbaiki tata kehidupan masyarakat Uni Soviet baik dalam bidang ekonomi maupun sosial-politik. Dari sinilah kemudian lahir "Glasnost dan Perestroika." Keduanya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan reformasi politik di Uni Soviet.¹¹

Glasnost dan Perestroika merupakan perwujudan dari restrukturisasi perekonomian yang dalam pelaksanaannya digunakan sebagai pedoman dalam menata aktivitas, gaya, sikap, metoda kerja dalam rangka penataan kembali perekonomian Uni Soviet setelah mengalami kehancuran. Seperti telah disebutkan

¹¹ Mikhail Gorbachev, "Perestroika : Pemikiran Baru Untuk Negara Kami Dan Dunia," *op.cit*, hal. 19

dalam bab terdahulu, Perestroika berarti mengatasi stagnasi serta menciptakan mekanisme yang dapat diandalkan dan efektif demi akselerasi kemajuan ekonomi. Perestroika juga berarti prakarsa massa, merupakan pengembangan menyeluruh dari demokrasi, pengobaran semangat upaya berprakarsa dan kreatif, perbaikan aturan dan disiplin. Perestroika merupakan intensifikasi menyeluruh perekonomian Uni Soviet, kebangkitan kembali prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan ekonomi negara serta pengenalan metode universal. Perestroika juga berarti pembersihan distorsi etika sosialis dan pelaksanaan konsisten keadilan sosial. Perestroika tidak terbatas pada penentuan prinsip-prinsip dasar bagi pengembangan sikap kreatif dan kritis dalam tata kehidupan sosial. Perestroika merupakan cara berpikir baru tentang bagaimana memperbarui atau menyegarkan kembali lingkungan sosial, politik dan ekonomi.¹²

Untuk melaksanakan Perestroika tentu diperlukan adanya dukungan dari masyarakat dan dituntut adanya inisiatif dan kreativitas yang besar serta partisipasi aktif dari semua warga negara Uni Soviet. Sedangkan partisipasi aktif dapat dijamin jika terdapat suatu sikap keterbukaan terutama dalam kalangan birokrat partai dan pemerintah.

Dari sinilah kemudian lahir konsep Glasnost yang diartikan sebagai keterbukaan politik, kebebasan pers ataupun kebebasan menyampaikan pendapat di kalangan masyarakat atau opini publik. Adanya keterbukaan dan kebebasan merupakan manifestasi dari demokrasi. Dan memang pada kenyataannya masyarakat Uni Soviet memang sangat membutuhkan demokrasi. Karena selama ini

¹² Mikhail Gorbachev, "Perestroika : Pemikiran Baru Untuk Negara Kami Dan Dunia," *ibid*, hal.21

masyarakat dibungkam oleh adanya satu sistem yang terpusat, tertutup dan otoriter. Selanjutnya Gorbachev menyatakan bahwa Glasnost merupakan pre-kondisi bagi terlaksananya Perestroika atau Restrukturisasi. Gorbachev juga menyatakan bahwa tanpa adanya suatu sikap politik yang tegas nampaknya sulit untuk memperoleh kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi.¹³

Glasnost sangat erat hubungannya dengan Perestroika. Adanya kemauan untuk membuka diri, keterbukaan terhadap kritik dan adanya jaminan terhadap sikap kritis akan dapat menciptakan suatu kehidupan politik yang lebih demokratis. Oleh karena itu diharapkan Glasnost dapat diterapkan di berbagai aspek yang nantinya akan dapat mendorong lahirnya demokrasi di semua bidang kehidupan masyarakat.¹⁴

Dari dua konsep di atas yaitu Glasnost dan Perestroika yang diterapkan oleh Gorbachev dalam upaya melaksanakan program reformasinya, dapat kita lihat bahwa Glasnost atau Keterbukaan merupakan kondisi yang diperlukan guna terlaksananya Perestroika atau Restrukturisasi. Sebab tanpa adanya keterbukaan dan kebebasan dalam berpendapat, maka tidak akan dapat diketahui kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki atau ditata kembali dalam tatanan atau sistem yang baru sehingga nantinya akan didapat hasil yang lebih baik. Dengan demikian adanya Glasnost dan Perestroika yang dilaksanakan dengan baik nantinya akan dapat menciptakan suatu masyarakat yang demokratis. Itulah inti dari program reformasi yang dilaksanakan oleh Gorbachev yaitu Glasnost, Perestroika dan Demokratizatsia. Ketiga konsep inilah yang

¹³ David E. Powel, "Soviet Glasnost : Definition and Dimention," *Current History*, Oktober 1988, hal. 322

¹⁴ Mikhail Gorbachev, "Perestroika : Pemikiran Baru Untuk Negara Kami Dan Dunia," *op.cit*, hal.

dijadikan pedoman untuk menciptakan suatu masyarakat yang demokratis dalam upayanya mengatasi masalah yang tengah terjadi di Uni Soviet.

Dengan dilaksanakannya pembaruan oleh Gorbachev, ternyata telah membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan sosial politik di Uni Soviet. Perubahan-perubahan ini terutama terjadi pada tatanan kehidupan politik masyarakat, seperti dalam struktur, proses atau tujuan-tujuan yang kemudian berpengaruh pula terhadap distribusi dan penggunaan kekuasaan oleh pemerintah Uni Soviet. Dapat kita lihat bahwa terjadiperubahan dalam struktur pemerintahan, proses Pemilu dan orientasi serta tujuan pembangunan Uni Soviet. Hal-hal tersebut tentu saja akan berpengaruh pula terhadap struktur kekuasaan yang ada di Uni Soviet. Semakin berkurangnya kekuasaan PKUS, peranan parlemen yang lebih baik sebagai lembaga perwakilan rakyat menunjukkan bahwa di Uni Soviet telah terjadi adanya perubahan politik sebagai akibat dari adanya program reformasi.

Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Gorbachev tersebut berhasil menciptakan citra baru bagi Gorbachev sekaligus bagi Uni Soviet, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hal ini tidak terlepas dari trend perkembangan politik di dunia yang mendukung dilaksanakannya pola pemikiran baru yang dicetuskan oleh Gorbachev. Adapun trend perkembangan dunia tersebut antara lain;¹⁵ pertama, meningkatnya interdependensi antar negara-negara di dunia. Kemajuan teknologi komputer, komunikasi dan transportasi yang telah mendatangkan era informasi dan menjadikan dunia

¹⁵ A. Hasnan Habib, "Makna Perkembangan di Uni Soviet dan Eropa Timur bagi Hubungan Internasional," dalam Dwi Susanto dan Zainuddin Djafar, *op.cit*, hal. 95-96

semakin sempit, telah mendorong saling keterkaitan dan ketergantungan antar negara. Masalah sistem penunjang kehidupan seperti udara, laut, sungai masalah meningkatnya suhu politik dunia dan masalah-masalah pengrusakan dan kerusakan lingkungan, merupakan ancaman baru terhadap sumber daya hidup dan membahayakan kehidupan manusia. Ancaman ini hanya dapat ditanggulangi dengan dijalinnya kerjasama internasional. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah masalah bahaya perang nuklir, dimana senjata nuklir ini mempunyai daya musnah yang sangat dahsyat. Karena hal tersebut sangat membahayakan umat manusia, maka setiap negara hendaknya sedapat mungkin menghindarinya.

Kedua, kedaulatan dan kekuasaan nasional mengalami erosi. Interdependensi yang meningkat dari sistem internasional dan masalah-masalah besar yang melampaui dan melintasi perbatasan nasional menimbulkan erosi kekuasaan dan kedaulatan nasional suatu negara. Kemampuan negara-nasional untuk menentukan sendiri masa depannya, menggariskan sendiri geraknya, semakin lemah. Negara-negara akan harus selalu menyesuaikan diri dengan dinamika internasional. Ini menunjukkan semakin berpengaruhnya faktor-faktor eksternal dalam perumusan kebijakan-kebijakan nasional dan sebagainya, keharusan adanya keterbukaan dalam sistem pemerintahannya.

Ketiga, multipolarisasi dunia yang semakin nyata bagi meningkatnya interdependensi antar negara, pengaruh dan kekuasaan adikuasa semakin berkurang. Kekuatan-kekuatan baru, terutama kekuatan-kekuatan ekonomi, muncul menyaingi kekuasaan adikuasa bahkan ada yang sudah melampaui Uni Soviet.

Keempat, masalah-masalah ekonomi menjadi lebih utama daripada masalah-masalah politik. Dalam situasi semua negara bergiat membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan ekonomi, motivasi ekonomi akan merupakan dorongan utama bagi kegiatan bangsa-bangsa dan sekaligus sebab utama dari konflik internasional. Ini tidak berarti bahwa masalah-masalah politik sudah tidak penting lagi. Masalah politik tetap penting, terutama apabila masalahnya menyangkut keamanan internasional.

Dari adanya trend perkembangan internasional, yang paling penting adalah terbukanya kemungkinan-kemungkinan yang memberikan harapan bagi perkembangan dunia ke arah yang lebih baik bagi semua bangsa dan negara. Hubungan antar negara kini kembali berkisar pada kepentingan bersama, kepentingan kerjasama, untuk mengatasi ancaman bersama yang bersifat trans-nasional, bahkan mengarah ke tingkat global.

4.2 Perkembangan Reformasi dan Dampaknya Terhadap Situasi dan Kondisi di Uni Soviet

4.2.1 Perkembangan Reformasi

Dengan digulirkannya program reformasi politik di Uni Soviet, ternyata belum mampu mengubah keadaan Uni Soviet ke arah yang lebih baik. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari stabilitas politik yang goyah begitu juga dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Uni Soviet.

Dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam kehidupan politik masyarakat Uni Soviet menyebabkan timbulnya keberanian dari masyarakat untuk mengeluarkan pendapat melontarkan kritik

bahkan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Keadaan seperti ini sangat berpengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh PKUS. Selama ini PKUS-lah yang memegang monopoli kekuasaan, namun dengan adanya reformasi politik yang memberikan kebebasan berpendapat tersebut menyebabkan kekuasaan dan wibawa PKUS semakin menurun.

Gejala menurunnya kekuasaan yang dimiliki oleh PKUS ini semakin jelas dengan ditegaskannya adanya kemungkinan pembentukan partai selain PKUS oleh Gorbachev. Disebutkan oleh harian pemerintah *Pravda* yang memuat butir pemikiran Gorbachev yang mengisyaratkan monopoli PKUS akan dihapus. Gorbachev menyatakan bahwa PKUS akan menanggalkan klaim monopoli komunis dan sedang menyiapkan diri berdialog politik dengan berbagai kekuatan yang memihak pembaruan masyarakat sosialis.¹⁶ Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita lihat bahwa Gorbachev memang benar-benar ingin melaksanakan reformasi dengan sebaik-baiknya. Dengan dihapuskannya monopoli kekuasaan PKUS menandakan bahwa Uni Soviet tidak lagi menganut sistem monolitik melainkan sistem multipartai yang lebih demokratis.

Akan tetapi usaha Gorbachev untuk melaksanakan reformasi bukan tidak mendapat hambatan. Perubahan sistem dari sentralistis menuju sistem multipartai yang lebih demokratis tentu saja tidak diterima begitu saja oleh semua kalangan. Terjadi pertentangan antara kelompok reformis yang mendukung adanya perubahan dalam sistem politik di Uni Soviet dengan kelompok konservatif yang ingin mempertahankan sistem sentralistis. Hal ini tentu saja merupakan

¹⁶ "Gorbachev Usulkan Monopoli Kekuasaan PKUS Dihapus," *Kompas*, 6 Feb. 1990

Dengan adanya keterbukaan dan kebebasan dalam kehidupan politik masyarakat Uni Soviet menyebabkan timbulnya keberanian dari masyarakat untuk mengeluarkan pendapat melontarkan kritik bahkan menyampaikan tuntutan-tuntutan kepada pemerintah. Keadaan seperti ini sangat berpengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh PKUS. Selama ini PKUS-lah yang memegang monopoli kekuasaan, namun dengan adanya reformasi politik yang memberikan kebebasan berpendapat tersebut menyebabkan kekuasaan dan wibawa PKUS semakin menurun.

Gejala menurunnya kekuasaan yang dimiliki oleh PKUS ini semakin jelas dengan ditegaskannya adanya kemungkinan pembentukan partai selain PKUS oleh Gorbachev. Disebutkan oleh harian pemerintah *Pravda* yang memuat butir pemikiran Gorbachev yang mengisyaratkan monopoli PKUS akan dihapus. Gorbachev menyatakan bahwa PKUS akan menanggalkan klaim monopoli komunis dan sedang menyiapkan diri berdialog politik dengan berbagai kekuatan yang memihak pembaruan masyarakat sosialis.¹⁶ Dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita lihat bahwa Gorbachev memang benar-benar ingin melaksanakan reformasi dengan sebaik-baiknya. Dengan dihapuskannya monopoli kekuasaan PKUS menandakan bahwa Uni Soviet tidak lagi menganut sistem monolitik melainkan sistem multipartai yang lebih demokratis.

Akan tetapi usaha Gorbachev untuk melaksanakan reformasi bukan tidak mendapat hambatan. Perubahan sistem dari sentralistis menuju sistem multipartai yang lebih demokratis

¹⁶ "Gorbachev Usulkan Monopoli Kekuasaan PKUS Dihapus," *Kompas*, 6 Feb. 1990

tentu saja tidak diterima begitu saja oleh semua kalangan. Terjadi pertentangan antara kelompok reformis yang mendukung adanya perubahan dalam sistem politik di Uni Soviet dengan kelompok konservatif yang ingin mempertahankan sistem sentralistis. Hal ini tentu saja merupakan tantangan bagi Gorbachev untuk mengambil keputusan guna kebijakan reformasinya.

Dari sini tampak bahwa reformasi yang dijalankan oleh Gorbachev mengalami hambatan. Namun hal ini bukan berarti kegagalan total dari reformasi. Sebab setelah dicetuskannya reformasi politik oleh Gorbachev, telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan sosial-politik masyarakat Uni Soviet misalnya dengan dilaksanakannya Pemilu yang demokratis pada 26 Maret 1989. Para pendukung reformasi menilai hal tersebut sebagai satu langkah besar menuju demokrasi selanjutnya. Selain itu adanya isyarat bagi pembentukan partai baru telah membuktikan akan berakhirnya sistem monolitik yang berarti pula akan mengakhiri monopoli kekuasaan oleh PKUS. Hal inilah yang menyebabkan semakin lemahnya kontrol pusat terhadap wilayah-wilayah di Uni Soviet.

Dalam bidang pemerintahan, Gorbachev mengusulkan kepada parlemen agar kekuasaan eksekutif diperluas. Maksud dari usul perluasan kekuasaan eksekutif ini adalah agar Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi di Uni Soviet. Namun usul tersebut ditolak oleh parlemen karena dikhawatirkan adanya kekuasaan yang luas di tangan Presiden akan membangkitkan kembali kediktatoran di Uni Soviet.

Upaya untuk membentuk satu sistem multipartai di Uni Soviet ternyata juga mengalami kendala karena partai-partai atau kelompok-kelompok baru yang bermunculan belum memiliki struktur organisasi seperti PKUS, yang telah memiliki wakil dalam setiap lembaga negara. Partai-partai atau kelompok-kelompok baru tersebut selama ini hanya bergerak di pinggiran arena politik Uni Soviet.

4.2.2 Dampak Reformasi Terhadap Situasi Dan Kondisi di Uni Soviet

Pada uraian di atas telah dijelaskan bahwa reformasi politik yang dilaksanakan oleh Gorbachev ternyata berpengaruh cukup kuat terhadap kehidupan politik di Uni Soviet, terutama dalam perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik dan partisipasi masyarakat dalam politik yaitu dengan adanya kebebasan dalam opini publik.

Selain membawa pengaruh dalam kehidupan politik, pembaruan di Uni Soviet ternyata juga menimbulkan dampak terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Adapun dampak dari reformasi di Uni Soviet antara lain dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun dari dampak tersebut, dampak yang paling penting adalah bangkitnya gerakan nasionalisme dari Republik-Republik yang ada di bawah Uni Soviet yang menuntut untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Hal ini tentu saja dapat membahayakan persatuan dan keutuhan wilayah Uni Soviet, dalam hal ini tuntutan yang paling menonjol berasal dari Republik-Republik di kawasan Baltik.

4.2.2.1 Bangkitnya Gerakan Nasionalisme di Republik-Republik Uni Soviet

Sejak digulirkannya gagasan Glasnost dan Perestroika, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Gorbachev banyak mengalami

masalah yang semakin lama semakin rumit. Selain masalah ekonomi yang mengalami kemerosotan tajam, Uni Soviet juga mengalami masalah yang sangat penting yaitu masalah kebangkitan nasionalisme etnis. Masalah ini tentu saja merupakan isu yang paling fundamental karena kebangkitan nasionalisme tersebut sangat mungkin terjadi karena sifat polietnis dan multi nasional yang dimiliki oleh Uni Soviet.

Adanya masalah kebangkitan nasionalisme ini akan mengancam integrasi nasional Uni Soviet sekaligus dapat menyebabkan kehancuran nasional. Kebangkitan nasionalisme sebagai dampak negatif dari adanya reformasi politik Uni Soviet ini dapat dilihat dengan munculnya gerakan-gerakan nasionalisme yang pecah di berbagai wilayah Uni Soviet. Seperti yang terjadi di wilayah selatan Uni Soviet yaitu Azerbaijan, Armenia dan Georgia, juga yang terjadi di kawasan Baltik, Lithuania, Latvia dan Estonia.

Munculnya gerakan nasionalisme ini tidak lepas dari latar belakang sejarah penggabungan Republik-Republik tersebut ke dalam wilayah Uni Soviet. Proses integrasi yang dialami oleh tiga Republik Baltik tersebut dilakukan dengan cara yang tidak demokratis, yaitu dengan paksaan dan perjanjian rahasia Molotov-Ribbentrop Pact pada 1939 antara Stalin dan Hitler. Dalam perjanjian tersebut berisi tentang pembagian wilayah Eropa Timur yang memutuskan ketiga Republik di Baltik berada di bawah dominasi Soviet.

Sebenarnya terdapat dua pendekatan untuk menciptakan integrasi seperti yang dikemukakan oleh Myron Weiner yaitu persatuan dalam keaneka-ragaman dan asimilasi. Dalam pengertian yang pertama adalah usaha untuk membentuk kesetiaan nasional tanpa menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas. Dalam hal ini identitas suku atau golongan minoritas

tetap diakui sebagai identitas nasional sebagaimana identitas kelompok mayoritas. Sedangkan asimilasi adalah pencapaian integrasi dengan menjadikan kebudayaan suku bangsa yang dominan dalam suatu negara sebagai kebudayaan nasional. Dimana dalam asimilasi ini tujuannya dapat dicapai dengan merundukkan kelompok minoritas.

Demikian pula yang terjadi di Uni Soviet, terdapat dua pendekatan yang hampir sama dengan teori pembentukan integrasi nasional. Yang pertama adalah *Sblizheni*, yang berarti mencapai integrasi dengan tetap memelihara identitas kesuku-bangsaan tetapi mempersempit perbedaan dalam ekonomi dan sosial diantara etnis, sehingga mencegah kemungkinan munculnya sentimen kebangsaan. Yang kedua adalah *Sliiani*, berarti menghilangkan perbedaan dengan menekankan peleburan suku-suku bangsa menjadi satu kultur yang seragam. *Sblizheni* dalam hal ini bisa disejajarkan dengan persatuan dalam keaneka-ragaman, sementara *Sliiani* mendekati pengertian asimilasi.²¹

Di dalam pengertian yang pertama, bisa dikatakan terkandung unsur-unsur yang bersifat alamiah yang membiarkan peleburan perbedaan antara suku-suku bangsa berjalan secara perlahan dan stabil. Dalam pengertian kedua, tampaknya lebih banyak bersifat paksaan. Sebab adanya persyaratan melepaskan identitas kesukuan secara total.

Sedangkan di Uni Soviet, yang banyak diterapkan adalah integrasi dalam bentuk asimilasi. Hal ini semakin ditunjang oleh adanya kebijakan Russifikasi yang dilaksanakan dengan paksaan dan ancaman pada masa Stalin. Sehingga yang tercipta adalah satu bentuk integrasi semu, pernyataan dan kepatuhan yang dipaksakan dalam satu etnis tertentu. Dan munculnya Gorbachev

²¹ F. Iriani Sophiam Yudoyoko, "Disintegrasi Uni Soviet dan Negara-Negara Bagiamnya," *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal 71

Setelah dilaksanakannya reformasi, ternyata banyak membawa perubahan di Uni Soviet. Semua keputusan yang sebelumnya ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini PKUS, setelah adanya reformasi keputusan yang diambil haruslah merupakan hasil dari sidang kongres. Seperti yang dilakukan oleh kongres pada awal September 1991, dimana mayoritas anggota kongres menyepakati lahirnya suatu Uni Baru yang berdaulat. Ini merupakan permulaan hubungan yang bersifat demokratis dan seimbang antar negara-negara berdaulat yang sebelumnya sangat terpusat pada pemerintah pusat. Bentuk konfederasi longgar semacam ini menurut Gorbachev adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan persatuan.²⁵ Kongres tersebut selain menghasilkan formulaasi baru, juga pengakuan hak-hak individu atas negara termasuk persamaan hak, kebebasan berbicara dan beragama, serta kebebasan memiliki pekerjaan.

Persetujuan kongres yang mengakui hak tiap-tiap Republik guna menentukan nasib sendiri tentunya akan mengurangi fungsi dan peranan partai komunis yang sebelumnya mendominasi kekuasaan di Uni Soviet. Kondisi menyebabkan perlunya dibentuk suatu struktur pemerintahan baru sementara konstitusi permanen terbentuk. Struktur ini memiliki dua sistem kekuasaan yakni Dewan Negara dan Komite Ekonomi Antar Republik. Dalam struktur baru ini transformasi kekuasaan banyak dialihkan ke tangan Republik-Republik.

Dewan Negara berperan sebagai badan eksekutif tertinggi, terdiri dari para Presiden Republik yang memutuskan untuk tetap berada dalam Uni. Dewan ini diketuai oleh Presiden Uni Soviet, tanpa Wakil Presiden. Tugas Dewan Negara terutama adalah

²⁵ Tempo, 14 September 1991

komitmen yang terbagi antara lain; 1) Struktur paling atas, merupakan inti Uni Baru. Struktur inti ini terdiri atas Republik Rusia, Kazakhstan, Belorusia dan keempat Republik Asia Tengah. Semua terikat dalam konfederasi yang mengalokasikan kekuasaan terbatas di sektor pertahanan, kebijaksanaan luar negeri dan ekonomi pada pemerintah pusat. Republik-Republik ini dapat menerapkan konstitusi bersama yang berada di bawah Undang-Undang mereka sendiri. Kekuasaan-kekuasaan pengikat Uni lama seperti KGB, PKUS dan militer Uni soviet bisa dihapus atau di bawah kontrol ketat, 2) Struktur kedua, meliputi Republik-Republik yang sudah memproklamasikan kemerdekaan tetapi ingin tetap terikat dalam Uni. Armenia dan Ukraina dapat dimasukkan dalam kelompok ini. Kedua Republik ini telah mengadakan perjanjian-perjanjian bilateral dengan Uni Baru di sektor pertahanan, perdagangan dan kebijaksanaan luar negeri. Faktor pendorong yang memasukkan mereka dalam struktur ini karena mayoritas penduduknya adalah orang Rusia, 3) Tingkatan ketiga, terdiri dari Republik-Republik yang hanya terikat dalam kerjasama ekonomi. Termasuk dalam kelompok ini adalah ketiga Republik Baltik ditambah Georgia dan Maldivia. Terutama ketiga Republik Baltik yang sungguh-sungguh ingin memisahkan diri dari Uni Soviet. Bahkan ketiga Republik tersebut mulai mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Seperti yang dilakukan oleh Latvia, yang telah mengadakan hubungan dengan Amerika Serikat dalam rangka mempersiapkan pembangunan lembaga pendidikan.

Ketiga Republik Baltik setelah mendapat pengakuan dari dunia internasional secara *de jure* maupun *de facto*, kini ketiganya merupakan negara yang merdeka penuh. Mereka mempunyai hak suara yang sama dengan negara merdeka lain di

antara Armenia dan Azerbaijan. Kerusuhan-kerusuhan etnis ini tidak saja terjadi di Armenia tetapi ternyata telah meluas sampai ke Republik-Republik yang ada di wilayah Baltik yaitu Lithuania, Latvia dan Estonia.

Masalah etnis yang terjadi di wilayah Baltik bermula ketika Estonia dan Latvia menuntut kepada pemerintah agar diberi hak mengatur urusan imigrasi ke Republik mereka, selain itu mereka juga menuntut agar mereka diperbolehkan mengembangkan bahasa asli mereka di sekolah-sekolah serta seni budaya tradisi mereka. Tuntutan ini dilakukan karena di wilayah tersebut orang Estonia dan Latvia merupakan kelompok minoritas. Keadaan tersebut merupakan akibat dari adanya migrasi besar-besaran suku-suku bangsa lain secara paksa maupun sukarela berdasarkan kebijakan Moskow setelah Perang Dunia II. Selain tuntutan-tuntutan di atas, Estonia dan Latvia dalam satu dokumen yang disusun bersama oleh kelompok non-pemerintah seperti kelompok pecinta lingkungan hidup dan Front Nasional dimana dalam dokumen tersebut berisi tuntutan mengenai hak untuk menentukan gaji dan penanaman modal. Bahkan Estonia menuntut agar diberi hak penuh mengelola sumber-sumber alam mereka sendiri.

Sementara itu penulis Latvia, Yanis Peters, menyatakan kepada mingguan *Lietraturnya Gazeta* tentang perlunya memperkuat dan mengembangkan federalisme Soviet berdasarkan prinsip Leninis. Ini berarti Republik-Republik Soviet adalah bagaikan negara-negara berdaulat dan bukan sebagai teritori (semacam wilayah taklukan). Dan jika usul tersebut diterima dan diberlakukan di semua (15) Republik Uni Soviet, maka hal itu bisa menuju kepada penciptaan bentuk pemerintahan konfederasi

di Uni Soviet daripada pemerintahan monolitik sentralis yang sekarang berlaku.²⁴

Karena belum juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah pusat, tiga Republik yang berada di wilayah Baltik tersebut terus menuntut hak otonomi dengan melakukan demonstrasi-demonstrasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua, usaha-usaha untuk mendapatkan kembali wilayah dan kedaulatannya, rakyat Baltik terus melakukan gerakan guna memperjuangkan tuntutan mereka. Bahkan tuntutan dari tiga Republik tersebut kemudian berkembang tidak lagi menuntut otonomi, melainkan menuntut pemisahan diri dari kekuasaan pemerintah pusat. Bahkan Lithuania sangat keras dalam memperjuangkan tuntutan tersebut.

Tuntutan tersebut dapat dipahami karena tiga Republik di kawasan Baltik tersebut merupakan Republik-Republik yang cukup kaya dan produktif. Namun selama ini masyarakat di wilayah tersebut tidak ikut merasakan hasil dari sumber-sumber daya yang mereka miliki. Hal inilah yang menimbulkan rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat, mereka merasa pemerintah pusat telah mengeksploitasi kekayaan yang mereka miliki untuk kepentingan pemerintah pusat sendiri.

Berbeda dengan dua Republik lainnya, Lithuania berusaha untuk mendapatkan tuntutannya dengan cara yang radikal. Bangsa Lithuania mengadakan gerakan-gerakan dan demonstrasi-demonstrasi yang tidak jarang menyebabkan pihak militer turun tangan sehingga akhirnya banyak jatuh korban. Adanya tawaran penyelesaian secara politis oleh Gorbachev yaitu melalui Undang-Undang Pemisahan Diri, semakin mendorong Lithuania untuk segera memisahkan diri dari Uni Soviet sebelum diberlakukannya

²⁴ "Estonia dan Latvia Minta Bentuk Konfederasi," Kompas 24 Juni 1988

Undang-Undang tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pada tanggal 11 Maret 1991 Soviet Tertinggi Lithuania memproklamasikan kemerdekaan Lithuania dan mengangkat Vyatautas Landbergis, ketua Sajudis, sebagai Presiden Lithuania dan Kazimiera Prunskiene sebagai Perdana Menteri.

Perjuangan untuk melepaskan diri dari Uni Soviet yang dilakukan Latvia Estonia tidak seradikal yang dilakukan oleh Lithuania. Namun bukan berarti perjuangan dua Republik tersebut tidak berat. Estonia lebih memilih jalan konstitusional dalam memperjuangkan tuntutannya untuk lepas dari Uni Soviet. Melalui kongres-kongres Partai Komunis Estonia, ditentukan langkah-langkah dalam usaha untuk mencapai tujuan untuk melepaskan diri dari pemerintah pusat. Selain itu kelompok yang memperjuangkan tuntutan tersebut, seperti kelompok nasionalis lebih memilih jalan perundingan dengan pihak Moskow. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat Estonia tidak ingin kekerasan yang terjadi di Lithuania akan terulang di Estonia. Usaha rakyat Estonia ini akhirnya mencapai tujuannya dengan diproklamasikan kemerdekaan Estonia pada 19 Agustus 1991.

Tidak jauh berbeda dengan perjuangan rakyat Estonia, di Latvia perjuangan untuk memperoleh kembali kedaulatan dan wilayahnya juga dilaksanakan dengan melaksanakan aksi-aksi terbuka tapi tidak seradikal Lithuania. Gerakan kemerdekaan Latvia pada mulanya mendapat tantangan bahkan dinyatakan harus dibubarkan oleh Soviet Tertinggi Latvia. Namun ternyata gerakan kemerdekaan ini malah mendapat simpati dan dukungan dari rakyat Latvia, bukan saja orang-orang yang tergabung dalam Front Rakyat tetapi orang-orang di luar organisasi tersebut. Perjuangan Front Rakyat bersama seluruh masyarakat Latvia ini

akhirnya mencapai puncaknya dengan diproklamasikannya kemerdekaan Latvia pada 20 Agustus 1991.

4.3.2 Faktor-faktor Pendorong Pemisahan Tiga Republik Baltik Dari Uni Soviet

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pemisahan tiga Republik Baltik dari pemerintah pusat Uni Soviet merupakan suatu usaha untuk memperoleh kembali wilayah dan kedaulatannya yang telah dirampas sejak tahun 1940. Keinginan pemisahan diri Republik-Republik tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong keinginan pemisahan tersebut.

Adapun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain :

1. Faktor Dalam Negeri

Keinginan untuk memisahkan diri dari Uni Soviet oleh tiga Republik Baltik dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dalam negeri Republik-Republik yang bersangkutan maupun kondisi dalam negeri Uni Soviet secara umum. Faktor-faktor dalam negeri tersebut antara lain :

a) Faktor Sejarah

Sejak awal mula sejarah tergabungnya Lithuania, Latvia dan Estonia berbeda dengan Republik federal Uni Soviet lainnya. Dimana dalam proses penggabungannya, ketiga Republik tersebut menganggap tindakan Uni Soviet sebagai pemaksaan, aneksasi yang tidak sah menurut hukum.

Keadaan ini kemudian menjadi salah satu pendorong Republik Baltik untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Keinginan ini semakin kuat karena banyak mendapatkan dukungan dari dunia internasional terutama dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat. Dukungan ini diberikan karena memang negara-negara tersebut tidak pernah mengakui Lithuania, Latvia dan Estonia sebagai bagian dari Uni Soviet. Sebagai bukti negara-

negara tersebut mendukung pemisahan Republik Baltik adalah bahwa sebelum ketiga Republik tersebut memisahkan diri dari Uni Soviet, mereka sudah mengakui kemerdekaan Republik Baltik dan mereka juga akan segera membuka perwakilannya di ketiga Republik Baltik, Lithuania, Latvia dan Estonia.

b) Faktor Sosial Budaya

Uni Soviet merupakan negara yang multi etnis. Tidak kurang dari 108 etnis menghuni Uni Soviet dan diantaranya adalah etnis Baltik yang terdiri dari bangsa Lithuania, Latvia dan Estonia.

Dari berbagai etnis tersebut, etnis Baltik mendapat penggolongan tersendiri berdasarkan geografinya, sejarahnya serta kebudayaannya. Pada kenyataannya, kebudayaan Republik Baltik memang lebih teridentifikasi dengan budaya Eropa daripada budaya Slavia (Rusia). Untuk itulah keadaan ini setidaknya sudah menciptakan kesulitan tersendiri untuk mengintegrasikan bangsa tersebut dengan Uni Soviet.

Keadaan tersebut semakin parah dengan adanya program Russifikasi yang berusaha menghilangkan identitas budaya bangsa Lithuania, Latvia dan Estonia. Russifikasi seolah-olah ingin menomor-satukan budaya Rusia di atas budaya Baltik. Russifikasi, selalu berusaha mengesampingkan rakyat Baltik baik dalam pemerintahan maupun perekonomian.

Dari sini sudah barang tentu menimbulkan perasaan sentimen di kalangan masyarakat Republik Baltik. Dimana bangsa Lithuania, Latvia dan Estonia seakan diharuskan mengalah pada bangsa Rusia padahal mereka adalah bangsa pendatang.

c) Faktor Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah Pusat

Sejak Lithuania, Latvia dan Estonia dinyatakan sebagai bagian dari Uni Soviet pada 1940, dominasi Uni Soviet terhadap

ketiga negara tersebut sudah terlihat sangat menonjol. Tidak hanya pada bidang pemerintahan tetapi juga pada bidang perekonomian.

Hal ini tidak terlepas dari sistem politik Uni Soviet yang bersifat terpusat dan tidak memberikan otonomi kepada negara bagiannya termasuk Republik Baltik. Seperti terlihat pada bidang pemerintahan, PKUS memegang monopoli kekuasaan yang tidak terbatas. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat kelonggaran bagi Republik-Republik Soviet termasuk Republik Baltik untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahannya.

Sedangkan dalam bidang perekonomian ketidakpuasan Republik Baltik terhadap kebijaksanaan pemerintah Uni Soviet terlihat dengan dikeluarkannya pernyataan kebulatan tekad ketiga Republik Baltik untuk menuntut dilakukannya peralihan wewenang yang lebih besar mengenai perekonomiannya. Hal ini terjadi karena mekanisme perekonomian Uni Soviet menganut sistem perekonomian terpusat. Jadi seluruh roda perekonomian di masing-masing Perekonomian dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat dan tertutup kesempatan bagi Republik-Republik untuk mengelola perekonomiannya sendiri. Rasa tidak puas ini semakin parah dengan adanya kegagalan upaya restrukturisasi perekonomian (Perestroika) yang dinilai terlalu lamban, yang akhirnya tidak menjadikan keadaan perekonomian Uni Soviet semakin baik malah sebaliknya.

2. Faktor Luar Negeri

Selain faktor dalam negeri, keinginan pemisahan diri tiga Republik Baltik juga dipengaruhi oleh faktor di luar kondisi dalam negeri Uni Soviet. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi keinginan pemisahan diri tersebut yaitu adanya trend perkembangan politik internasional yang tidak lagi menekankan

pada persaingan kekuatan militer, melainkan bergeser pada persaingan ekonomi. Adanya pergeseran dalam trend perkembangan politik tersebut menuntut suatu negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain disebabkan semakin tingginya interdependensi diantara negara-negara di dunia. Apabila suatu negara tidak mengikuti perkembangan yang ada maka kemungkinan negara tersebut tidak akan dapat bertahan hidup, sebab suatu negara tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa mengadakan kerjasama dengan negara lain. Selain itu isu demokratisasi merupakan isu utama yang dapat mempengaruhi peranan suatu negara dalam percaturan politik internasional saat ini. Suatu negara yang tidak melaksanakan demokratisasi akan sulit untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara Barat yang demokratis dimana sebagian besar dari negara Barat tersebut merupakan negara kaya dan sekaligus sebagai pemilik modal yang sangat besar.

Dengan adanya trend perkembangan politik internasional tersebut, memaksa Gorbachev untuk mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dengan program reformasi yang dicetuskannya. Oleh karena itu akhirnya Gorbachev menyatakan bahwa ia akan memberikan kebebasan kepada Republik-Republik yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat Uni Soviet. Adapun langkah yang ditempuh Gorbachev antara lain dengan mengeluarkan referendum dan mengatur pelaksanaan pemisahan diri tersebut dalam suatu Undang-Undang yang dikeluarkannya pada tahun 1988.

4.4 Kebijakan Gorbachev Dalam Mengatasi Masalah Pemisahan Diri Tiga Republik Baltik

Kebangkitan nasionalisme yang akhirnya berkembang menjadi keinginan untuk memisahkan diri dari beberapa Republik di Uni Soviet merupakan dampak negatif dari adanya program reformasi Gorbachev. Keinginan pemisahan diri ini dilihat dari pihak Republik-Republik Uni Soviet merupakan satu hal yang wajar sebab sebagai negara yang sebelumnya merdeka dan kemudian mengalami aneksasi, maka dengan adanya Glasnost yang memberikan kebebasan dan keterbukaan bagi semua lapisan masyarakat, mereka secara otomatis akan berusaha mendapatkan kembali kedaulatan dan kemerdekaannya.

Mengatasi masalah tersebut, Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet sekaligus Presiden Uni Soviet, berusaha keras agar usaha pemisahan diri tiga Republik Baltik dari Uni Soviet tidak terjadi. Karena apabila tiga Republik tersebut berpisah, maka akan menimbulkan keinginan yang sama pada Republik-Republik lainnya di Uni Soviet. Keadaan ini tentu saja akan sangat membahayakan kesatuan dan keutuhan wilayah Uni Soviet.

Sikap Gorbachev terhadap masalah etnis sebenarnya cukup tegas. Gorbachev tidak dapat mentolerir sikap nasionalis kesukuan terjadi,²⁷ namun sulit dicegah hal itu terjadi. Karena kompleksnya permasalahan etnis yang terjadi di Uni Soviet,

²⁷ Martha Brill Olcott, "The Soviet (Dis) Union," *Foreign Policy*, Spring 1991, No. 82, hal. 220, dalam Tri Nuke Tjajastuti, "Rusia dan Problema Integrasi Politik Soviet," *Global - 3*, (PT) Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 33

Gorbachev kemudian mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pendekatan yang merupakan penggabungan dari beberapa kebijaksanaan. Di satu pihak ia memberikan toleransi kepada wilayah Baltik yang kaya, yang akhirnya membuahkkan otonomi dan kemerdekaan. Namun di lain pihak ia bersikap tegas terhadap Republik-Republik di Asia Tengah yang merupakan bagian vital dari perekonomian Uni Soviet.
2. Mengadakan perundingan dan perjanjian dengan para pemimpin Republik Uni yang diharapkan akan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan diantara mereka yang memang belum terealisasi. Terutama dalam usaha penyelesaian masalah etnis dan keinginan pemisahan diri Republik-Republik di kawasan Baltik, perundingan dilakukan guna mencari titik temu antara pemerintah pusat dengan Republik-Republik Baltik mengenai jalan keluar terbaik sebagai usaha mencegah terjadinya disintegrasi di Uni Soviet.
3. Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur Pemisahan Republik-Republik dari Uni Soviet. Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut dari adanya pasal 72 Konstitusi Uni Soviet yang dijadikan landasan oleh Republik-Republik untuk melepaskan diri dari Uni Soviet. Dalam UU yang dikeluarkan pada tahun 1988 tersebut diatur tentang mekanisme pemisahan diri serta syarat-syarat pemisahan suatu Republik dari kekuasaan pemerintah pusat Uni Soviet. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain; suatu Republik yang ingin memisahkan diri dari Uni Soviet harus didukung oleh dua pertiga suara dan harus menunggu selama 5 tahun sebelum

pemisahan. Selain itu Republik yang ingin memisahkan diri harus memberi ganti rugi kepada Uni Soviet atas fasilitas-fasilitas dan prasarana-prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Uni Soviet.

Pemisahan tiga Republik Baltik tersebut sebenarnya merupakan tantangan bagi Gorbachev dalam menegakkan reformasi yang ditumbuh-kembangkannya. Oleh karena itulah maka usaha penyelesaian masalah pemisahan diri tiga Republik Baltik tersebut dilakukan dengan cara damai tanpa menggunakan kekerasan seperti yang dijanjikan oleh Gorbachev. Adapun pertimbangan Gorbachev mengambil jalan damai adalah; penyelesaian dengan kekerasan bertentangan dengan semangat reformasi.

Penyelesaian dengan kekerasan akan semakin memperburuk citra pemerintah Uni Soviet baik di dalam negeri maupun di mata internasional terutama negara-negara demokratis Barat. Dalam hal ini pertimbangan Gorbachev adalah apabila ia mengambil langkah penyelesaian dengan kekerasan, maka akan dapat menghambat pembangunan Uni Soviet selanjutnya. Sebab negara-negara Barat tersebut tidak akan mau memberikan bantuan kepada Uni Soviet apabila pelaksanaan demokratisasi di Uni Soviet tidak berjalan dengan semestinya. Apalagi negara-negara Barat terutama Amerika Serikat jelas-jelas memberikan dukungan terhadap pemisahan tiga Republik Baltik karena memang Amerika Serikat tidak pernah mengakui aneksasi yang dilakukan oleh Uni Soviet terhadap negara-negara di kawasan Baltik.

BAB V KESIMPULAN

Dengan pengertian bahwa kesimpulan disusun sebagai jawaban terhadap masalah yang dirumuskan, maka dalam bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dari keseluruhan uraian pada bab-bab sebelumnya.

Berdasarkan analisis terhadap data yang berhasil dihimpun, maka dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, permasalahan yang terjadi di Uni Soviet berawal dari adanya krisis nasional. Krisis nasional ini terjadi karena adanya warisan masa lampau dari pemimpin-pemimpin terdahulu sebelum Gorbachev, yaitu keadaan yang buruk dalam kehidupan perekonomian dan politik di Uni Soviet. Terjadinya stagnasi ekonomi disebabkan tidak adanya keseimbangan antara struktur penawaran dan permintaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan politik banyak terjadi penyalahgunaan wewenang, tingginya tingkat korupsi dan rendahnya tingkat kedisiplinan. Keadaan yang demikian buruk tersebut timbul sebagai akibat dari adanya sistem pemerintahan yang terpusat, otoriter dan tertutup serta adanya pemberian hak istimewa terhadap golongan tertentu oleh pemegang kekuasaan pada waktu itu.

Kedua, dengan munculnya Gorbachev sebagai pemimpin baru Uni Soviet dengan gagasan reformasinya, telah membawa angin segar dan harapan bagi terciptanya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat Uni Soviet. Dengan program reformasi ini Gorbachev berupaya untuk mengatasi krisis nasional yang terjadi di Uni Soviet selama ini. Adanya keterbukaan dan kebebasan dalam reformasi membawa pengaruh dalam pola pikir dan perilaku masyarakat Uni Soviet. Masyarakat Uni Soviet yang pada masa kepemimpinan sebelum Gorbachev tidak mendapat kesempatan untuk bebas berpendapat, kini

berubah menjadi masyarakat yang kritis; berpendapat mengemukakan harapan dan keinginannya, mengkritik pemerintah bahkan menuntut apa yang menjadi hak mereka. Reformasi benar-benar telah membawa perubahan dalam semua aspek kehidupan masyarakat Uni Soviet.

Reformasi yang dilaksanakan oleh Gorbachev yaitu Glasnost, Perestroika dan Demokratizatsia sebenarnya merupakan suatu program yang ditujukan untuk mengadakan restrukturisasi terhadap sistem yang selama ini dilaksanakan di Uni Soviet. Program yang dilaksanakan oleh Gorbachev ini tidak terlepas dari adanya trend perkembangan politik internasional yang telah mengalami pergeseran, tidak lagi menekankan pada kekuatan militer melainkan pada kekuatan ekonomi. Adanya saling ketergantungan diantara negara-negara memaksa tiap negara untuk melaksanakan kerjasama dengan negara lain. Selain itu adanya isu demokratisasi di dunia internasional memaksa setiap negara untuk bersikap lebih terbuka.

Namun program reformasi yang dilaksanakan Gorbachev ternyata menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan elit politik Uni Soviet. Adanya sikap pro dan kontra dalam tubuh parlemen menyebabkan munculnya kelompok oposisi dalam tubuh parlemen. Kelompok konservatif yang menentang reformasi, beranggapan bahwa reformasi akan menghancurkan nilai-nilai sosialisme, sehingga akan membahayakan masa depan komunisme. Sedangkan kelompok reformis radikal sangat mendukung reformasi bahkan menilai reformasi yang dilaksanakan oleh Gorbachev berjalan terlalu lamban, mereka menghendaki perubahan secara cepat dan radikal dalam semua aspek kehidupan masyarakat Uni Soviet. Namun sebenarnya Gorbachev telah menyatakan bahwa reformasi yang dilaksanakan adalah usaha yang ditujukan untuk mengadakan perubahan terhadap sistem yang selama ini berlaku dengan sistem baru

tanpa meninggalkan nilai-nilai sosialisme yang dimiliki oleh Uni Soviet.

Ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi dengan adanya reformasi akhirnya menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Uni Soviet.

Dalam kehidupan ekonomi, berbagai kebijakan ekonomi yang dilaksanakan ternyata tidak menampakkan hasil seperti yang diharapkan, bahkan sebaliknya kondisi perekonomian Uni Soviet semakin menurun. Bukan itu saja, Uni Soviet yang sebelumnya tidak pernah mengalami inflasi, kini tingkat inflasi yang terjadi cukup tinggi bahkan hampir sama dengan keadaan stagnasi.

Dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh adanya reformasi yang dilaksanakan oleh Gorbachev, yang paling mencemaskan adalah bangkitnya gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme pecah di mana-mana, termasuk di wilayah Baltik. Bahkan gerakan nasionalisme di tiga Republik Baltik bergulir dalam waktu yang cepat bahkan kemudian berkembang menjadi tuntutan pemisahan diri dari kekuasaan pemerintah pusat. Keinginan pemisahan diri tiga Republik Baltik ini didorong oleh adanya latar belakang sejarah penyatuan tiga Republik tersebut secara paksa ke dalam Uni Soviet yaitu dengan adanya perjanjian rahasia Molotov-Ribbentrop antara Stalin dan Hitler pada tahun 1939, selain itu faktor sosial-budaya masyarakat Baltik yang berbeda dengan bangsa Rusia dimana terdapat usaha penghapusan budaya masyarakat Baltik melalui program Russifikasi dan migrasi besar-besaran etnis lain ke wilayah Baltik pada masa Stalin yang menyebabkan bangsa Baltik menjadi kelompok minoritas di wilayahnya sendiri, serta adanya rasa tidak puas terhadap pemerintah pusat Uni Soviet dimana masyarakat Baltik yang cukup kaya merasa bahwa pemerintah pusat telah mengeksploitasi kekayaan yang mereka miliki untuk kepentingan pemerintah pusat sendiri yang semakin mendorong

Republik-Republik Baltik untuk memisahkan diri dari Uni Soviet. Keinginan pemisahan diri tiga Republik Baltik ini berakhir dengan diproklamasikannya kemerdekaan tiga Republik Baltik. Lithuania memperoleh kemerdekaan pada bulan Maret 1991, sedangkan Latvia dan Estonia pada bulan Agustus 1991.

Sebenarnya tuntutan untuk memperoleh kemerdekaan dan lepas dari kekuasaan pemerintah pusat Uni Soviet merupakan tindakan yang tidak melanggar konstitusi. Karena keinginan untuk memisahkan diri dari Uni Soviet tersebut secara legal dijamin dalam konstitusi Uni Soviet pasal 72 tahun 1977.

Keempat, menghadapi keinginan pemisahan diri tiga Republik Baltik dari Uni Soviet, Gorbachev mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan jalan damai tanpa menggunakan kekerasan. Penyelesaian tanpa kekerasan ini dilakukan melalui jalur konstitusional yaitu dengan mengatur mekanisme dan syarat-syarat pemisahan tersebut dalam Undang-Undang yang dikeluarkan pada tahun 1988. Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan bahwa kekerasan tidak sesuai dengan jiwa reformasi. Selain itu Gorbachev juga tidak ingin citra Uni Soviet semakin buruk di dunia internasional terutama negara-negara Barat yang sangat menyoroti pelaksanaan demokratisasi di Uni Soviet. Hal ini dilakukan mengingat pada saat itu Uni Soviet sangat membutuhkan bantuan dana dari negara-negara Barat guna melaksanakan pembangunan dalam negerinya, apabila pelaksanaan demokratisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya maka negara-negara Barat tidak akan mau memberikan bantuan kepada Uni Soviet.

DAFTAR PUSTAKA

- Donald W. Treathgold, Twentieth Century Russia, (Boston : Houghton Mifflin Company) Hal 159.
- Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral,(Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1988) Hal : 155.
- Jack C. Plano, (Et All), Kamus Analisa Politik, Rajawali, Jakarta, 1985, Hal : 162 - 163.
- Jan Arveds Trapans, Toward Independence : The Baltic Popular Movements, Westview Press, Boulder, San Fransisco & Oxford, 1991, Hal 26.
- Komarudin, Kamus Istilah Skripsi dan Thesis, Angkasa, Bandung, 1974, Hal 91 - 92.
- Mary G dan Robert W. Kweit, Metode dan Konsep Analisa Politik, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hal 23.
- M. Amien Rais, Beberapa Teori Hubungan Internasioanl, UGM, Yogyakarta, 1986.
- Mikhail Gorbachev, Perestroika : Pemikiran Baru Untuk Negara Kami dan Dunia, PT Gelora Aksara Pratama, 1987.
- Mochtar Mas'oeed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Roger Scruton, Dictionary Of Political Thought, London : Pan Books Ltd, 1983.
- S. P. Varma, Modern Political Theory, Tohir Effendi (ed), Rajawali Press, Jakarta, 1987, Hal 490.
- Drs. Soepeno Sunardjo, Mikhail Gorbachev : Tokoh Pembaruan Abad Ini, Pustaka Yayasan 17 - 8- 45, 1990.
- Stephen Kux, Sovyet Federalism : A Comparative Perspective, Boulder West View Press, 1990.
- The Lian Gie, Ilmu Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Tjipta Lesmana, Runtuhnya Kekuasaan Komunis, Jakarta :
Erwin-Rika Pers, 1990.

Winarno Surachmad, Dasar dan Teknik Research, 1978, CV
Tarsito, Bandung.

Ensiklopedia : 1. Ensiklopedia Nasional Indonesia

2. Microsoft ® Encharta ® Ensiklopedia (C), 1993-
1995.

3. Encyclopaedia Britannica Vol. 28

Terbitan Berkala : Current History.

Foreign Affair.

Global-3 Th 1992

International Affair

Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Th 1992

Surat Kabar : Kompas 24 Juni 1988

Kompas 6 Februari 1990

Kompas 3 April 1990

Kompas 16 Juli 1990

Kompas 27 Agustus 1991

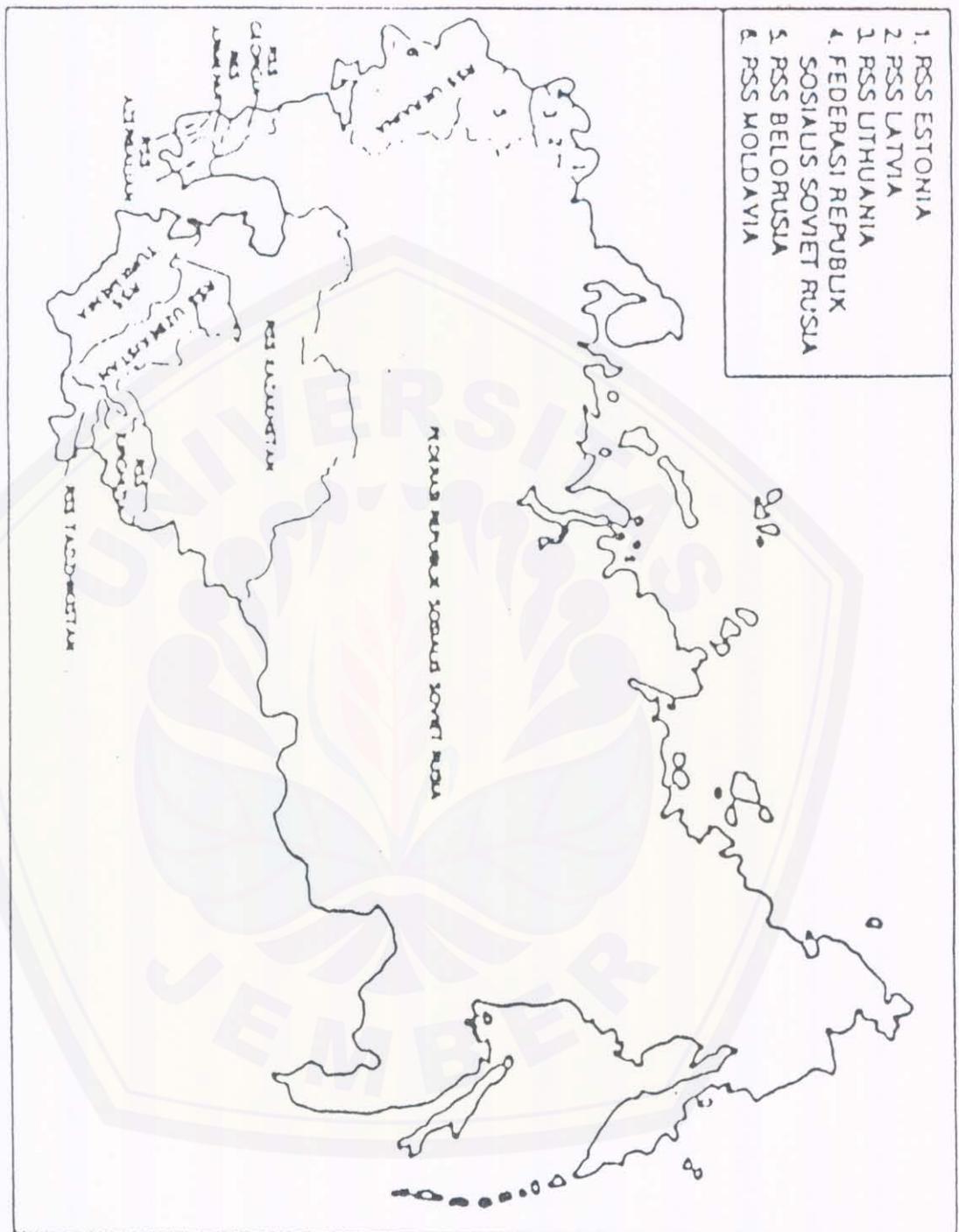
Majalah : Tempo 10 Februari 1990

Tempo 24 Maret 1990

Tempo 31 Maret 1990

Lampiran I:

Peta Uni Soviet

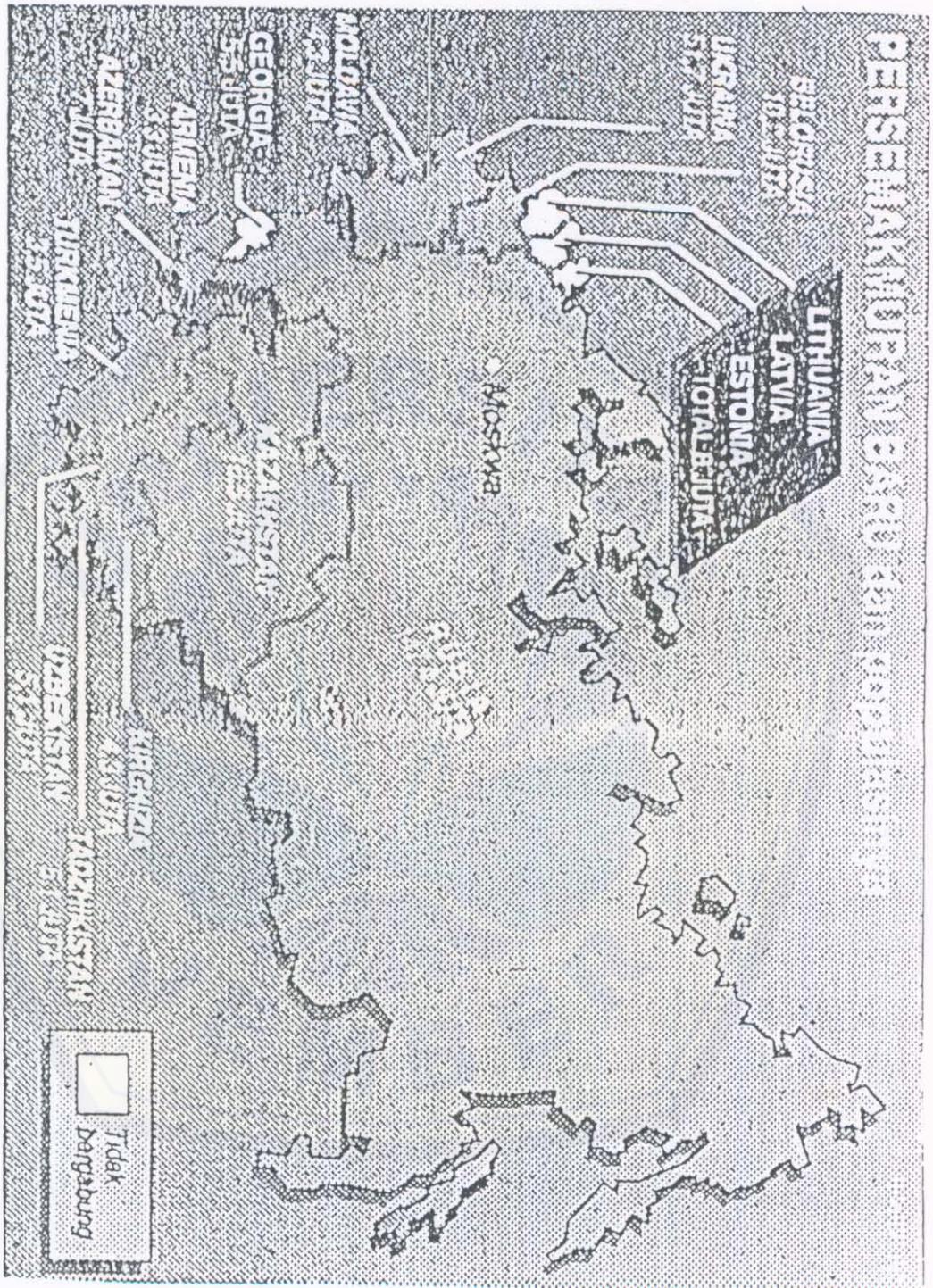


Sumber:

Negara dan Bangsa, (Jakarta: PT. Widyadara, 1989), hal.74.

Lampiran II:

Peta Persemakmuran Negara-Negara Merdeka
(Commonwealth of Independent States - CIS)



Sumber:

Kompas, 29 Desember 1991

Lampiran III :

PETA KAWASAN BALTIK



- KET : 1 ----- LITHUANIA
2 ----- LATVIA
3 ----- ESTONIA

Sumber : Ensiklopedia Britannica

Tabel Komposisi Kelompok Etnis di Uni Soviet

Kelompok Etnis	Dalam Ribuan	Persentase
Rusia	143.500	51,73
Ukrainia	43.500	15,68
Uzbek	14.800	5,34
Bellorussia	9.760	3,52
Kazakh	7.470	2,69
Tartar	6.600	2,38
Azeri	6.270	2,26
Armenia	4.580	1,65
Georgia	3.800	1,37
Tadzhik	3.450	1,24
Moldavia	3.165	1,14
Lithuania	2.985	1,08
Turkmen	2.400	0,87
Kirghiz	2.240	0,81
Jerman	2.000	0,72
Chuvash	1.790	0,65
Jahudi	1.750	0,63
Baskhir	1.470	0,53
Latvia	1.445	0,52
Mordvinia	1.140	0,41
Polan	1.140	0,41
Estonia	1.030	0,37
Kelompok lainnya	11.115	4,00

Sumber: *People of the World: a historical and ethnographic reference book*, Moscow: Nauka, 1988, hlm. 543.

Sumber:

Dwi Susanto dan Zainuddin Djafar (ed.), Perubahan Politik di Negara-Negara Eropa Timur, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 167.

Lampiran V:

Tabel Aktivitas/Sikap Politik Republik di Uni Soviet

NO.	REPUBLIK SIKAP POLITIKNYA (setelah kudeta Agustus 1991)
1. Rusia	ragu dalam mengumumkan kemerdekaannya
2. Ukraina	deklarasikan kemerdekaan 24 Agustus 1991
3. Belorusia	deklarasikan kemerdekaan 25 Agustus 1991
4. Lithuania	deklarasikan Maret 1990
5. Latvia	deklarasikan kemerdekaan 20 Agustus 1991
6. Estonia	deklarasikan kemerdekaan 19 Agustus 1991
7. Molavia	deklarasikan kemerdekaan 27 Agustus 1991
8. Georgia	deklarasikan kemerdekaan November 1990
9. Armenia	menentang partai komunis
10. Azerbaijan	mendukung pemimpin kudeta
11. Kazakstan	mendukung gerakan menuju konfederasi
12. Uzbekistan	mencanangkan lembaga kemerdekaan
13. Tadjikistan	bekukan partai komunis (deklarasikan
14. Kirgizia	kemerdekaan 9 September 1991
15. Turkmenistan	akan menandatangani Union Treaty
	akan menandatangani Union Treaty

Sumber:

Global, no. 3, 1992, hal. 31



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : RIKI WATI HASTUTI

Status : MAHASISWA

Alamat : JL. JAWA ITC NO. 21 JEMBER

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

DAMPAK REFORMASI POLITIK DI UNI SOVIET
TERHADAP NEGARA-NEGARA DI KAWASAN BALTIC

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 19 NOV 1999



Soedarso
Soedarso
Kepala Perpustakaan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Veteran No.3 Telephone (0331) 422723 Fax. (0331) 425540
Jember (68118)

Nomor : 838/1J25.2/PG/99
Lampiran :
Perihal : Permohonan ijin mengadakan
Penelitian

11 Oktober 1999

Kepada : Yth, Sdr .Pimpinan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

Nama / NIM / Jur : RINA DWI HASTUTI / E1A195022 / Hub. Internasional
Dosen/Mahasiswa : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Alamat : Jl. Jawa II-c / 21 Jember
Judul Penelitian : DAMPAK REFORMASI POLITIK DI UNI SOVIET TERHADAP
NEGARA - NEGARA DI KAWASAN BALTIK
Di Daerah : Jakarta
Lama Penelitian : 2 (dua) bulan

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon bantuan serta perkenan Saudara untuk memberikan ijin kepada dosen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Liakip
Drs. Liakip, SU
NIP. 130 581 976

Tembusan Kepada Yth. :

1. Sdr. Dekan Fakultas
Universitas Jember
2. Dosen/Mahasiswa ybs.